

LAPORAN KINERJA
KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT
2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan limpahan kasih sayang-Nya sehingga kami dapat mempersembahkan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2024. Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang dibebankan kepada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Duren mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Selama Tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2023 yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja (LAKIN) ini akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Atas izin Tuhan, kerja keras, kerja sama, serta sinergi dari seluruh pegawai, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat mencapai penerimaan pajak sebesar Rp 723.136.127.799 atau 100,24% dari target yang ditetapkan dengan total Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,14%.

Keberhasilan inii tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan partisipasi seluruh Wajib Pajak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wajib Pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Akhir kata, semoga LAKIN KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2024 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban dan transparansi kami dalam rangka perwujudan *good governance*, serta dapat menjadi *feedback* untuk meningkatkan kinerja organisasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om santi santi om

Pajak Kuat, Indonesia Maju!

Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Duren Sawit



Ditandatangani secara elektronik
Amy Nurhayati



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
C. Sistematika Laporan Kinerja.....	5
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Strategis.....	7
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja.....	8
C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).....	10
BAB III.....	11
AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Realisasi Anggaran.....	115
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	117
D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	118
BAB IV.....	119
PENUTUP.....	119
LAMPIRAN I.....	120
LAMPIRAN II.....	121
LAMPIRAN III.....	127

DAFTAR GAMBAR

TABEL 3. 1 NILAI KINERJA ORGANISASI KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT.....	11
TABEL 3. 2 REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024.....	14
TABEL 3. 3 TARGET DAN REALIASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024 PER JENIS PAJAK.....	15
TABEL 3. 4 SEBARAN REALISASI PELAPORAN SPT TAHUN 2024.....	37
TABEL 3. 5 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	116
TABEL 3. 6 PERBEDAAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2024.....	116

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 3. 1 PERSENTASE PERBANDINGAN CAPAIAN IKU.....	12
GRAFIK 3. 2 PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP PAGU ANGGARAN 2021-2024.....	115

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2024 BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN, PANGKAT/GOLONGAN, DAN JABATAN.....	5
TABEL 2. 1 TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	8
TABEL 3. 1 NILAI KINERJA ORGANISASI KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT.....	11
TABEL 3. 2 REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024.....	14
TABEL 3. 3 TARGET DAN REALIASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024 PER JENIS PAJAK.....	15
TABEL 3. 4 SEBARAN REALISASI PELAPORAN SPT TAHUN 2024.....	37
TABEL 3. 5 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	116
TABEL 3. 6 PERBEDAAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2024.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit dibentuk sebagai bagian dari reorganisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan mulai beroperasi tanggal 2 Oktober 2007 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007.

Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit meliputi wilayah Kecamatan Duren Sawit pada Kota Administrasi Jakarta Timur yang terletak antara 106°49'35" Bujur Timur dan 06°10'37" Lintang Selatan dengan luas wilayah 22,65 Km². Kecamatan Duren Sawit terdiri dari 7 kelurahan yakni :

1. Kelurahan Pondok Bambu;
2. Kelurahan Malaka Jaya;
3. Kelurahan Duren Sawit;
4. Kelurahan Pondok Kopi;
5. Kelurahan Pondok Kelapa;
6. Kelurahan Klender;
7. Kelurahan Malaka Sari.

Sebagai salah satu bagian dari unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Nota Dinas 1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi selama Tahun 2024.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Dengan tantangan wilayah kerja yang cukup luas, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal, mengefektifkan penyuluhan, melaksanakan pengawasan serta penegakan hukum yang adil dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi yang ada, sehingga diharapkan dapat meningkatkan *voluntary compliance* Wajib Pajak yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan jumlah

penerimaan pajak. Selain itu, dengan adanya nilai restitusi Wajib Pajak yang tinggi di tahun 2024 (senilai Rp 105.997.660.852) menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit untuk dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor lain yang memungkinkan sebagai upaya untuk dapat menambah nilai realisasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dan memenuhi target yang telah diamanatkan.

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sebagai salah satu unit vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

KPP Pratama Jakarta Duren Sawit merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur.

2. Tugas

KPP Pratama Jakarta Duren Sawit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;

- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan

pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan;

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komposisi pegawai yang mendukung operasional KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 100 orang yang terdiri dari 60 laki-laki dan 40 perempuan yang dapat dikelompokkan sesuai jenjang pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Pangkat/Golongan, dan Jabatan

Pendidikan		Pangkat / Golongan		Jabatan	
Jenjang	Jumlah	Golongan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
S2	13	IV	11	Kepala Kantor	1
S1 / D4	58	III	60	Kasi,Kasubbag	10
D3	13	II	29	Fungsional	19
D1	11			AR	37
SLTA	5			Pelaksana	33
SLTP	-				
SD	-				

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva Tahun Anggaran 2024

C. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2024 didasarkan dari penghitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Nota Dinas nomor 8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja ini terdiri dari beberapa IKU/IKI pada seluruh unit DJP yang penyusunannya dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku *KKO-One*. Penyusunan IKU/IKI yang menjadi dasar pengukuran kinerja unit ini dilakukan dengan melibatkan berbagai Direktorat terkait yang mengampu masing – masing IKU/IKI.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, disampaikan juga hambatan serta tindakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sebagai langkah penyelesaian hambatan tersebut, serta rencana kerja yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut di tahun 2025.

Selain hal – hal terkait dengan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2024, pada laporan ini juga disampaikan hal – hal terkait dengan realisasi anggaran pada tiap – tiap pagu yang telah direncanakan untuk tahun 2024, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Dari penjelasan tersebut, Laporan Kinerja Tahun 2024 ini tersusun dari beberapa materi, sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Perencanaan Kinerja;
3. Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari :
 - a. Capaian Kinerja Organisasi;
 - b. Realisasi Anggaran
4. Penutup;
5. Lampiran, yang terdiri dari perjanjian kinerja dan lampiran Nilai Kinerja Organisasi tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak. Selama tahun 2020 sampai dengan 2024, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tiga sasaran strategis, diantaranya adalah :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah;

Dengan adanya sasaran strategis tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah menyusun beberapa rencana kerja tahun 2024 sebagai strategi untuk mencapai target penerimaan tahun 2024 serta sebagai wujud pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya adalah :

1. Penambahan petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sebagai respon atas ketentuan terbaru pada ND-37/PJ.09/2024 tentang penghentian layanan online atas kondisi kahar pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
2. Penyusunan rencana penyuluhan Wajib Pajak selama tahun 2024 sesuai dengan tema yang telah ditentukan pada ND-11/PJ.09/2024, yaitu meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan; serta meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku;
3. Pelaksanaan kegiatan penagihan berupa penerbitan 12.000 surat teguran; 2.400 surat paksa; 200 pemblokiran; 60 penyitaan; 2 kegiatan lelang; 2 kegiatan pencegahan; dan 2 kegiatan penghapusan piutang pajak;
4. Peningkatan penyelesaian pemeriksaan Lebih Bayar pada PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi; penyelesaian pemeriksaan khusus; peningkatan produksi KKA Mandiri berdasarkan DSPP Kolaboratif; melakukan usulan bantuan penilaian dan bantuan audit forensik;

5. Optimalisasi pada penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM);
6. Optimalisasi penyampaian SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
7. Peningkatan pengawasan sektoral dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis;
8. Optimalisasi rencana kebutuhan anggaran seluruh kegiatan untuk mewujudkan penggunaan anggaran yang semakin efektif, efisien, akuntabel, dan mendukung pelaksanaan rencana kerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang.

Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah disusun dan ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nomor Perjanjian Kinerja nomor PK-8/WPJ.20/2024. Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berisi program kerja yang terdiri dari indikator kinerja yang saling berkaitan dengan amanat pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 yang merupakan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Secara terinci Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	
7.	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	80%
		Tingkat efektivitas penagihan	75%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2024

Penyusunan Indikator Kinerja yang menjadi langkah mencapai sasaran kerja atau sasaran program dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan seluruh pengampu IKU serta unit vertikal lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Cara penyusunan ini akan tetap dilaksanakan pada penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025, dengan mempertimbangkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak, Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Pajak, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), amanat Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta masukan yang diterima dari Unit Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit secara aktif turut serta memberikan masukan perbaikan IKU/IKI. Terkait dengan IKU/IKI tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah menyampaikan usulan

perbaikan atau *refinement* atas Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan IKU/IKI dengan Nota Dinas nomor 1089 Tahun 2023 yang disampaikan tanggal 25 Agustus 2023.

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024 memiliki visi ‘*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*’. RPJMN berkaitan erat dengan seluruh kementerian di Indonesia, salah satunya Kementerian Keuangan, dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak juga turut serta berkaitan dengan pelaksanaan RPJMN tersebut. Dari tujuh agenda yang diamanatkan oleh RPJMN, terdapat satu agenda yang sangat berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu agenda untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Sesuai dengan agenda tersebut, terdapat dua indikator yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :

1. Rasio perpajakan terhadap PDB

Direktorat Jenderal Pajak menjadi pendorong dalam memenuhi indikator ini dengan cara memperkuat basis penerimaan pajak nasional dan membantu Badan Kebijakan Fiskal untuk mencapai target secara umum.

2. Agenda pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Coretax*)

Pembaruan sistem perpajakan merupakan proses pembaruan sistem administrasi pajak sehingga menjadi terintegrasi dan lebih akuntabel. Direktorat Jenderal Pajak berperan secara langsung dalam proses pembaruan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain – lain, serta evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja organisasi berisi capaian kinerja sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi. Realisasi anggaran berisi penggunaan anggaran untuk mewujudkan realisasi kinerja organisasi. Efisiensi penggunaan sumber daya berisi penggunaan sumber daya KPP Pratama Jakarta Duren Sawit selama tahun 2024. Kinerja lain – lain berisi hasil penghargaan yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja berisi program evaluasi internal yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. NKO KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2024 adalah sebesar 109,14%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

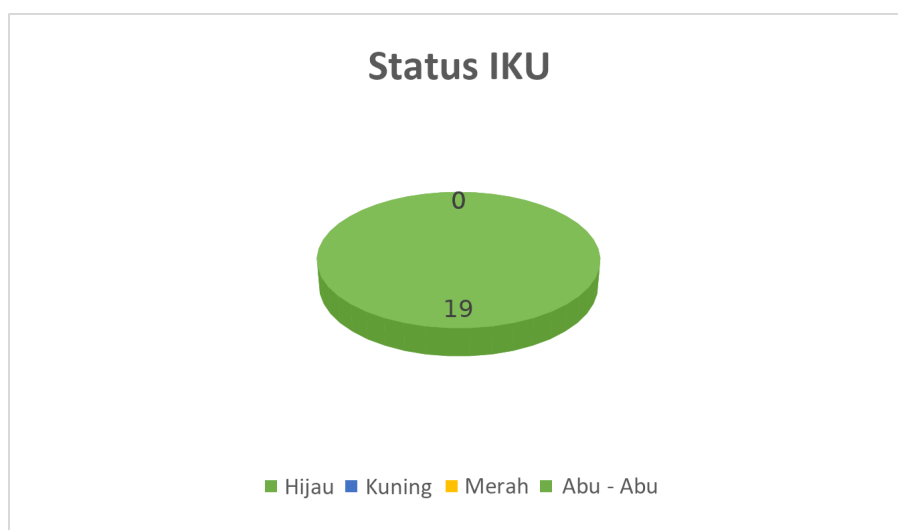
Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

PERSPEKTIF	BOBOT	NILAI
STAKEHOLDER	30%	100,96%
CUSTOMER	20%	101,34%
INTERNAL PROCESS	25%	118,11%
LEARNING AND GROWTH	25%	116,23%
NILAI KINERJA ORGANISASI	100%	109,14%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

Pada tahun 2024, dari 19 IKU KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, seluruh IKU telah memenuhi target dan berstatus hijau.

Grafik 3. 1 Persentase Perbandingan Capaian IKU



Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2024

Sembilan belas IKU berwarna hijau yang memiliki hasil capaian 100% atau lebih adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
13. Tingkat efektivitas penagihan;
14. Persentase penyampaian usul pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;

16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM;
17. Indeks Penilaian Integritas Unit;
18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Uraian narasi masing – masing IKU dapat dirinci sebagai berikut :

1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	17,98%	40,30%	40,30%	65,11%	65,11%	100,24%	100,24%
Capaian	81,73%	80,60%	80,60%	86,81%	86,81%	100,24%	100,24%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

c) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak

Target penerimaan pajak

x 100%

2) Penjelasan Realisasi IKU

Hasil penerimaan pajak merupakan pokok capaian dari segala proses bisnis yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Duren Sawit periode 2024 Per Jenis Pajak disajikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

URAIAN	REALISASI		Growth (%)	
	2024	2023	2024	2023
A. Pajak	370,919,229,065	303,819,542,972	22.09	(23,09)
Penghasilan				
PPh Pasal 21	82,046,275,382	62,509,020,110	31.26	29.49
PPh Pasal 22	26,700,381,073	11,442,428,886	133.35	(12.17)
PPh Pasal 22 Impor	9,347,948,857	7,456,181,908	25,37	51.83
PPh Pasal 23	9,720,610,706	9,692,060,886	0.29	29.63
PPh Pasal 25/29 OP	60,606,712,081	60,054,073,839	0.92	43.70
PPh Pasal 25/29	67,381,368,457	61,490,920,223	9.58	78.99
Badan				
PPh Pasal 26	721,052,410	257,136,987	180.42	34.62
PPh Final	114,316,044,463	90,904,630,171	25.75	(62.66)
PPh Lainnya	89,800,706	13,898,440	546.12	3.760.68
PPh Migas	(10,965,070)	(808,477)	(1,256.27)	(131.19)
B. PPN dan PPnBM	352,202,826,312	389,009,016,959	(9.46)	17.38

PPN Dalam Negeri	326,590,326,003	364,022,848,104	(10.28)	14.62
PPN Impor	25,424,715,058	24,305,935,316	0	98.74
PPnBM Dalam Negeri	74,447,155	(26,774,248)	378.06	(272.16)
PPnBM Impor	113,338,096	0	0	0
PPN Lainnya	0	27,955,857	(100.00)	(43.56)
PPN Dalam Negeri	0	679,051,930	(100.00)	(50.74)
DTP				
C. PBB dan BPHTB	0	0	0	0
D. PPh DTP	(17,138,484)	427,193,187	(104.01)	(86.24)
E. Pajak Lainnya	30,210,906	182,008	16,498.67	(99.48)
REALISASI	723,135,127,799	693,255,935,126	4.31	(4.94)

Sumber: Apportal DJP per tanggal 25 Januari 2025

Tabel 3. 3 Target dan Realiasi Penerimaan Pajak Tahun 2024 per Jenis Pajak

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A. Pajak Penghasilan	367,941,423,000	370,919,229,065	100.81
PPh Pasal 21	85,497,213,000	82,046,275,382	95.96
PPh Pasal 22	18,151,875,000	26,700,381,073	147.09
PPh Pasal 22 Impor	8,088,845,000	9,347,948,857	115.57
PPh Pasal 23	10,539,966,000	9,720,610,706	92.23
PPh Pasal 25/29 OP	67,214,404,000	60,606,712,081	90.17
PPh Pasal 25/29 Badan	66,508,452,000	67,381,368,457	101.31
PPh Pasal 26	596,997,000	721,052,410	120.78
PPh Final	111,343,671,000	114,316,044,463	102.67
PPh Lainnya	0	89,800,706	0
PPh Migas	0	(10,965,070)	0
B. PPN dan PPnBM	353,440,189,000	352,202,826,312	99.65
PPN Dalam Negeri	326,703,946,000	326,590,326,003	99.97
PPN Impor	26,326,796,000	25,424,715,058	96.57
PPnBM Dalam Negeri	101,921,000	74,447,155	73.04
PPN Lainnya	27,954,000	27,955,857	0.00
PPnBM Impor	0	113,338,096	0
PPN Dalam Negeri DTP	307,526,000	0	0
C. PBB dan BPHTB	0	0	0
D. PPh DTP	0	(-17,138,484)	0

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
E. Pajak Lainnya	28,662,000	30,210,906	105.40
TOTAL	721,410,274,000	723,135,127,799	100.24

Sumber: Apportal DJP per tanggal 25 Januari 2025

Komponen terbesar sumber penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2024 adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPH). Penerimaan sektor PPN dan PPnBM mencapai Rp352.202.826.312,00 dari target yang ditetapkan Rp353.440.189.000,00 atau sebesar 99,65%. Jika dibandingkan dengan total realisasi pajak, maka realisasi sektor PPN dan PPnBM memberi kontribusi sebesar 48,70%.

Penerimaan sektor PPh mencapai Rp370.919.229.065,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp367.941.423.000,00 atau sebesar 100,81%. Jika dibandingkan dengan total realisasi pajak, maka realisasi sektor PPh memberi kontribusi sebesar 51,29%.

Penerimaan pajak secara keseluruhan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada periode 2024 mencapai Rp723.135.127.799,00 atau sebesar 100,24% dari target ditetapkan sebesar Rp721.410.274.000,00 dengan pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 4,31%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,24%	105,91%	120,84%	100,00%	88,65%

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dapat memenuhi target yang ditetapkan selama empat tahun, sejak 2021 sampai dengan 2024. Walaupun demikian, terdapat penurunan penerimaan di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana hal ini dikarenakan adanya pembayaran restitusi kepada Wajib Pajak dengan nilai yang signifikan. Selain itu, banyaknya Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan omset maupun kemampuan bayar masih menjadi kendala dalam pencapaian target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak ini.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Target Tahun 2024 RPJMN
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	100%	100.24%

Penerimaan pajak selama s.d Triwulan IV Tahun 2024 dominan dari sektor perdagangan besar dan eceran; pejabat negara, karyawan; konstruksi; transportasi dan pergudangan; dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanah hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Penerimaan sektor perdagangan besar dan eceran terjadi kontraksi yang besar sebagai akibat dampak kebijakan fasilitas pajak mobil listrik. Selain itu, terdapat APBN-P serta penyesuaian target penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit menjadi sebesar Rp721.410.274.000,00 sehingga implikasinya adalah realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dapat melampaui target penerimaan (sesuai revisi).

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	104,24%

Berdasarkan dari realisasi tersebut, nilai realisasi dari KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkontribusi sebesar 0,0378% dari nilai total penerimaan negara dari pajak, yang nilainya sebesar Rp1.913.631.397.530.000,00. Total penerimaan pajak tersebut telah mencapai target tahun 2024 dengan capaian sebesar 100,46%, dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,05.

e. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- a) Menindaklanjuti SP2DK *Outstanding* (SP2DK yang diterbitkan sebelum tahun 2024) melalui kegiatan komunikasi persuasif, kunjungan lapangan (visit), konseling dan usulan pemeriksaan. Selama tahun 2024 telah menerbitkan 224 LHP2DK atas 231 SP2DK *Outstanding*;
- b) Akselerasi penyelesaian SP2DK atas DPP Kolaboratif dan DPP *Mandatory* Semester I dan Semester II Tahun 2024 dan telah menerbitkan 1.106 LHP2DK atas 1.262 SP2DK;
- c) Melakukan penelitian dan *adjustment* atas DPP rekomendasi yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP serta mengusulkan DPP Kolaboratif Semester I Tahun 2025 dengan DPP sebanyak 837 *row data* dan estimasi potensi sebesar Rp49.679.430.090,00
- d) Pengawasan Pembayaran Masa terhadap PPh 25/29 maupun PPN Tahun Berjalan dan pengawasan kewajiban perpajakan PKP;
- e) Melakukan penagihan kepada Wajib Pajak DSPC dan Wajib Pajak tunggakan besar lainnya dengan realisasi penerimaan Rp12.495.945.990,00
- f) Penerbitan 42 SKPKB senilai Rp20.755.893.512,00 dan telah terealisasi pembayaran sebesar Rp11.046.382.952,00

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target penerimaan di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :
 - a) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa yang baik;
 - b) Pengelolaan Komite Kepatuhan yang kompeten;
 - c) Adanya akselerasi penyelesaian SP2DK dan DPP Kolaboratif yang membantu meningkatkan capaian kinerja;
 - d) Aktifnya kegiatan penagihan Wajib Pajak DSPC yang berkontribusi pada capaian penerimaan;
 - e) Adanya evaluasi rutin yang mendorong pegawai dapat memenuhi target kinerja dengan tepat waktu
 - f) Adanya revisi atau perubahan pada target APBN menjadi sebesar Rp721.410.247.000,00

- Selain faktor pendorong, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam mencapai target kinerja ini, diantaranya adalah :
 - a) Kondisi ekonomi Wajib Pajak yang tidak menentu sehingga menyebabkan beberapa Wajib Pajak yang potensial untuk dilakukan pencairan kegiatan penagihan, pemeriksaan, maupun pengawasan menjadi tidak terealisasi;
 - b) Kepatuhan pemenuhan formal dan material kewajiban perpajakan oleh sebagian Wajib Pajak masih belum sesuai ketentuan perpajakan baik kewajiban PPh maupun PPN sehingga memerlukan tindakan pengawasan dan intensifikasi perpajakan yang lebih masif dan konsisten

Atas munculnya beberapa hambatan tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya :

- a) Melakukan penggalan potensi kepada Wajib Pajak lain yang potensinya dinilai dapat menutupi kekurangan realisasi dari prognosa yang telah direncanakan;
- b) Pembagian jadwal yang jelas dan pelaksanaan acara penyuluhan yang terstruktur dengan mempertimbangkan efisiensi kerja seluruh pegawai sehingga tidak menghambat kegiatan kerja pegawai dalam memenuhi target penerimaan tahun 2024;
- c) Optimalisasi penyelesaian SP2DK yang diterbitkan sebelum tahun 2024;
- d) Optimalisasi kegiatan pembahasan DPP Kolaboratif dengan Komite Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Memanfaatkan fasilitas digitalisasi dan aplikasi digital untuk dapat mengoptimalkan kinerja dan mengurangi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi capaian kinerja;
- b) Melakukan *coaching dan mentoring* yang efisien dan akuntabel sehingga memaksimalkan kinerja dari sumber daya manusia yang tersedia.

4) Analisis pelaksanaan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja

Sebagai tindakan preventif untuk mencegah kegagalan pemenuhan capaian kinerja penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melakukan beberapa kegiatan mitigasi, diantaranya adalah :

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan penerimaan rutin yang dilaksanakan pada rapat pembinaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- b) Pembentukan Tim SINAR PARIS (Sinergi AR dan Fungsional Pemeriksa Pajak) sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak;
- c) Penyelenggaraan FERARI (Forum Edukasi AR dan FPP) sebagai wadah untuk melakukan bedah kasus Wajib Pajak;
- d) Pelaksanaan rapat komite yang lebih berkualitas.

5) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Dalam pemenuhan realisasi kinerja, terdapat beberapa kendala yang terjadi dan menghambat pelaksanaan pemenuhan capaian kinerja. Kendala utama yang ada adalah kondisi ekonomi Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dimana kondisi tersebut sangat mempengaruhi penerimaan yang menjadi dasar penghitungan IKU ini. Atas adanya kendala ini, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk melakukan penggalan potensi kepada Wajib Pajak lain yang potensinya dinilai dapat menutupi kekurangan realisasi dari prognosa yang telah direncanakan.

6) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat capaian IKU sehubungan dengan GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

Tercapainya penerimaan yang optimal di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat mendukung berjalannya program RPJMN serta Rencana Strategis DJP, diantaranya adalah :

- a) Mendukung program pengarusutamaan gender sebagai proyek untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih kerap terjadi di Indonesia;
- b) Mendukung program pembangunan fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas serta pemberian insentif pada sektor yang dapat mempekerjakan penyandang disabilitas;
- c) Mendukung realisasi belanja sosial bagi pihak yang membutuhkan.

7) Analisis kontribusi IKU pada program pemerintah di bidang perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan

Dengan tercapainya target penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat membantu berjalannya program APBN, diantaranya adalah :

- a) Sebagai pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur negara yang berkenan dengan rehabilitasi ekosistem, subsidi atas perubahan iklim, serta pembiayaan infrastruktur hijau;
- b) Sebagai sumber anggaran Kesehatan untuk program perbaikan gizi;
- c) Sebagai sumber pembiayaan pemberdayaan perempuan;
- d) Sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, serta pemberian subsidi dan bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Akselerasi dan optimalisasi penyelesaian SP2DK *outstanding* yang diterbitkan sebelum tahun 2025 sebanyak 239 SP2DK dengan nilai potensi awal sebesar Rp27.849.493.199,00 melalui kegiatan:
 - a) Konseling;
 - b) Komunikasi persuasif dan/atau kunjungan lapangan dengan hasil realisasi pembayaran;
 - c) Usulan pemeriksaan (khusus, data konkret, bukper) atau ditutup tanpa realisasi;
- 2) Menerbitkan LHPT dan SP2DK atas DPP Kolaboratif Semester I Tahun 2024 yang telah disetujui Komite Kepatuhan KPDJP dan menindaklanjutinya sesuai SOP yang berlaku;
- 3) Melakukan penelitian tambahan/analisis mandiri sebagai bahan baku untuk diusulkan DPP Mandatory atau diterbitkan surat imbauan untuk meningkatkan PKM *Wider Revenue Activities* (WRA) sebagai langkah mitigasi risiko atas difisiensi bahan PKM dan kemungkinan *succes rate* yang tidak sesuai ekspektasi;
- 4) Menerbitkan imbauan kepada WP dalam rangka pengawasan pembayaran masa dan kewajiban PKP (PPh dan PPN), dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, tindak lanjut atas data yang diturunkan Kanwil, pemanfaatan data DDRM dan DMP serta analisis mandiri lainnya;
- 5) Membuat komitmen dan *timeline*/jadwal pembayaran pajak terutang yang disepakati dengan Wajib Pajak untuk penyelesaian SP2DK yang terdapat potensi pajaknya;

- 6) Penentuan target penerimaan Netto tahun 2025 agar dapat mempertimbangkan juga *shortfall* atas potensi Lebih Bayar (LB) yang mungkin akan dimintakan pengembalian pendahuluan atau restitusi;
- 7) Melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar dapat mengatur/menunda permohonan pengembalian pendahuluan;
- 8) Melakukan pengawasan atau monitoring realisasi pembayaran atas komitmen Wajib Pajak yang akan membayar secara angsuran.

2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	94,54%	100,00%	100,00%	101,01%	101,01%	101,95%	101,95%
Capaian	94,54%	100,00%	100,00%	101,01%	101,01%	101,95%	101,95%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

i. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

- Pertumbuhan Nasional (dengan bobot komponen sebesar 60 persen). Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

- Pertumbuhan unit (dengan bobot komponen sebesar 40%).
Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

ii. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

c) Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

2) Penjelasan Realisasi IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2024 mencapai 113,91%, dimana pertumbuhan bruto KPP Tahun 2024 sebesar 17,27%, pertumbuhan bruto nasional 5,02%, dan pertumbuhan bruto KPP tahun 2023 sebesar 15,07%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan pertumbuhan bruto KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2024 ini telah mengalami kenaikan sebesar 2,2% dari tahun 2023.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	101,95	114,96	99,63	107,83	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menurun apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh komponen deviasi akurasi perencanaan kas. Kondisi komponen deviasi akurasi perencanaan kas ini dapat terlihat sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Tabel realisasi komponen deviasi perencanaan kas tahun 2024

Prognosa Riwiyat Prognosa				
Prognosa Tahun 2024				
No.	Bulan	Prognosa	Realisasi	Deviasi
1.	12. Desember	87.083.573.712	87.785.994.890	0,83 %
2.	11. November	87.939.257.000	88.834.688.192	1,03 %
3.	10. Oktober	75.096.628.990	70.194.841.113	-6,53 %
4.	9. September	60.029.078.518	67.455.303.507	12,37 %
5.	8. Agustus	65.521.809.000	59.177.594.034	-9,68 %
6.	7. Juli	56.432.573.368	64.693.271.782	14,84 %
7.	6. Juni	55.543.174.048	58.052.924.014	4,52 %
8.	5. Mei	42.023.382.992	44.722.613.526	6,42 %
9.	4. April	64.754.087.082	66.554.740.573	2,78 %
10.	3. Maret	12.614.208.000	5.427.477.578	-56,97 %
11.	2. Februari	46.749.550.000	51.491.443.981	10,14 %
12.	1. Januari	81.595.404.000	80.744.234.609	-1,04 %
TOTAL		715.362.726.710	723.135.127.799	1,09 %

Deviasi merupakan nilai absolut, dengan conditional formatting :
 <=10% >10% and <=15% >15%

Sumber : Aplikasi Renpen per tanggal 20 Januari 2025

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat realisasi deviasi yang berstatus merah yang diakibatkan realisasi prognosa diatas 15%. Penyebab dari buruknya nilai deviasi ini dikarenakan adanya pengeluaran restitusi kepada Wajib Pajak sebesar Rp105.997.660.852,00 dan menyebabkan nilai realisasi hanya sebesar Rp5.427.477.578,00 dari yang seharusnya Rp12.614.208.000,00.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Target Tahun 2024 RPJMN
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100.00	101.95

Capaian realisasi penerimaan pajak bruto s.d Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp829.132.788.651,00 sedangkan realisasi penerimaan pajak bruto Triwulan IV

Tahun 2023 adalah sebesar Rp707.021.504.718,00. Sehingga terdapat pertumbuhan unit kerja tahun 2024 sebesar 17,27%. Dengan pertumbuhan nasional sebesar 5,02% maka capaian realisasi IKU Pertumbuhan Bruto adalah 113,9%. Prognosa penerimaan sebesar Rp715.362.726.710,00, sedangkan penerimaan netto sebesar Rp723.135.127.799,00 sehingga deviasi sd Triwulan IV adalah sebesar 10,63% dengan realisasi IKU deviasi sebesar 90%. Dari akumulasi dengan menggunakan formula IKU, didapat bahwa realisasi IKU pada tahun 2024 adalah sebesar 101,95.

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- a) Menindaklanjuti SP2DK *Outstanding* (SP2DK yang diterbitkan sebelum tahun 2024) melalui kegiatan komunikasi persuasif, kunjungan lapangan (visit), konseling dan usulan pemeriksaan. Selama tahun 2024 telah menerbitkan 224 LHP2DK atas 231 SP2DK *Outstanding*. Akselerasi penyelesaian SP2DK atas DPP Kolaboratif dan DPP *Mandatory* Semester I dan Semester II Tahun 2024 dan telah menerbitkan 1.106 LHP2DK atas 1.262 SP2DK;
- b) Akselerasi penyelesaian SP2DK atas DPP Kolaboratif dan DPP *Mandatory* Semester I dan Semester II Tahun 2024 dan telah menerbitkan 1.106 LHP2DK atas 1.262 SP2DK;
- c) Melakukan penelitian dan *adjustment* atas DPP rekomendasi yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP serta mengusulkan DPP Kolaboratif Semester I Tahun 2025 dengan DPP sebanyak 837 *row data* dan estimasi potensi sebesar Rp49.679.430.090,-
- d) Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan PKP;
- e) Optimalisasi penggalan potensi dengan fokus WP DPP.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target penerimaan di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :
 - a) Penyusunan prognosa yang lebih detil terutama di bagian yang dapat dikontrol seperti restitusi;
 - b) Melakukan koordinasi rutin dalam Komite Kepatuhan KPP untuk menentukan proyeksi penerimaan secara presisi.

- Selain faktor pendorong, ada faktor yang menjadi hambatan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam mencapai target kinerja ini, diantaranya adalah kondisi yang mengharuskan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan pengembalian kepada Wajib Pajak, contohnya restitusi baik melalui pengembalian pendahuluan maupun penerbitan SKPLB, yang mengakibatkan salah satu komponen penghitungan IKU tidak optimal

Atas munculnya beberapa hambatan tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya :

- a) Tetap menjaga kualitas penyusunan prognosa dengan baik dan detail, sehingga kemungkinan tingkat deviasi yang tinggi dapat dikontrol;
- b) Menjaga koordinasi dalam Komite Kepatuhan untuk dapat melakukan penyusunan proyeksi penerimaan dan presisi dan mendetail.

3) Analisa terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Memanfaatkan fasilitas digitalisasi dan aplikasi digital untuk dapat mengoptimalkan kinerja dan mengurangi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi capaian kinerja;
- b) Melakukan *coaching dan mentoring* yang efisien dan akuntabel sehingga memaksimalkan kinerja dari sumber daya manusia yang tersedia.

4) Analisis pelaksanaan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja

Sebagai tindakan preventif untuk mencegah kegagalan pemenuhan capaian kinerja penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melakukan beberapa kegiatan mitigasi, diantaranya adalah :

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan penerimaan rutin yang dilaksanakan pada rapat pembinaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- b) Pelaksanaan rapat komite yang lebih berkualitas.

5) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Dalam pemenuhan realisasi kinerja, terdapat beberapa kendala yang terjadi dan menghambat pelaksanaan pemenuhan capaian kinerja. Kendala utama yang ada adalah kondisi ekonomi dan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum yang sangat tentatif, sehingga akan memungkinkan prognosa yang telah dibuat tidak sesuai dengan realisasi. Untuk itu, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit mengoptimalkan

peran dukungan Komite Kepatuhan untuk dapat menjaga kestabilan penghitungan prognosa dan pemecahan masalah bersama agar kondisi penegakan hukum di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tetap terarah dan terjaga.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Terkait penerimaan PPM, akan menerbitkan imbauan kepada WP dalam rangka pengawasan pembayaran masa dan kewajiban PKP (PPh dan PPN), dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, tindak lanjut atas data yang diturunkan Kanwil, pemanfaatan data DDRM dan DMP serta analisis mandiri lainnya Menerbitkan LHPT dan SP2DK atas DPP Kolaboratif Semester I Tahun 2024 yang telah disetujui Komite Kepatuhan KPDJP dan menindaklanjutinya sesuai SOP yang berlaku;
- 2) Terkait penerimaan PKM dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Akselerasi dan optimalisasi penyelesaian SP2DK *outstanding* yang diterbitkan sebelum tahun 2025 sebanyak 227 SP2DK melalui kegiatan konseling, komunikasi persuasif dan/atau kunjungan lapangan dengan hasil realisasi pembayaran, usulan pemeriksaan (khusus, data konkret, bukper) atau ditutup tanpa realisasi;
 - b) Menerbitkan LHPT dan SP2DK atas DPP Kolaboratif yang telah disetujui Komite Kepatuhan KPDJP dan menindaklanjutinya sesuai SOP yang berlaku;
 - c) Melakukan penelitian tambahan/analisa mandiri sebagai bahan baku untuk diusulkan DPP *Mandatory* atau diterbitkan surat imbauan untuk meningkatkan PKM *Wider Revenue Activities* (WRA) sebagai langkah mitigasi risiko atas difisiensi bahan PKM dan kemungkinan *sukses rate* yang tidak sesuai ekspektasi;
 - d) Membuat komitmen dan *timeline*/jadwal pembayaran pajak terutang yang disepakati dengan Wajib Pajak untuk penyelesaian SP2DK yang terdapat potensi pajaknya;
 - e) Memperkuat koordinasi dan sinergi dalam Komite Kepatuhan KPP;
 - f) Mengingatkan seluruh aktor dalam PKM untuk mengisi atau memperbaharui (update) komitmen Wajib Pajak setiap menjelang akhir bulan sesuai hasil pembahasan dengan WP pada aplikasi yang terkait;
 - g) Memperhatikan tren penerimaan setiap bulan dari setiap jenis pajak;
 - h) Mengawasi pembayaran WP penentu penerimaan dan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan apabila ada penurunan pembayaran;

- i) Memastikan jumlah WP yang akan restitusi di bulan bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan serta Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- j) Tetap memantau WP yang melakukan transaksi dengan Bendahara, karena PPh Pasal 22 masih disetorkan di KPP WP terdaftar;
- k) Melibatkan semua seksi untuk penyusunan prognosa sehingga lebih presisi;
- l) Mengingatkan seluruh aktor dalam PKM untuk update komitmen menjelang akhir bulan pembayaran WP pada masing-masing aplikasi yang terkait pada DRM;
- m) Mempertimbangkan peralihan Sistem Perpajakan menggunakan Sistem *Core Tax* yang masih belum berjalan dengan lancar.

3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	22,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	17,04%	40,74%	40,74%	66,43%	66,43%	100,17%	100,17%
Capaian	77,47%	81,47%	81,47%	88,57%	88,57%	100,17%	100,17%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di *assesment* oleh direktorat teknis terkait

yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

2) Penjelasan Realisasi IKU

Capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM s.d Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp619.420.459.629,00 dari target penerimaan PPM setelah revisi menjadi sebesar Rp 618.356.531.000,00 atau tercapai 100,17%. Penerimaan pajak di Tahun 2024 dominan dari sektor perdagangan besar dan eceran, pejabat negara, karyawan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tana hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Penerimaan sektor perdagangan besar dan eceran terjadi kontraksi yang besar sebagai akibat dampak kebijakan fasilitas pajak mobil listrik

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,17%	118,07%	133,21%	104,67%	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dapat memenuhi target yang ditetapkan selama empat tahun, sejak 2021 sampai dengan

2024. Walaupun demikian, terdapat penurunan penerimaan di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana hal ini dikarenakan adanya pembayaran restitusi kepada Wajib Pajak dengan nilai yang signifikan. Selain itu, banyaknya Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan omset maupun kemampuan bayar masih menjadi kendala dalam pencapaian target IKU Persentase Realisasi Penerimaan dari kegiatan PPM ini.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100.17%

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa berkontribusi langsung pada IKU Penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Sehingga, semakin baik realisasi pada IKU ini sudah dapat dipastikan IKU ini juga berkontribusi pada target Rencana Strategis DJP.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,17%

Berdasarkan dari realisasi tersebut, nilai realisasi IKU ini berkontribusi sebesar 85,86% dari nilai total penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, yaitu sebesar Rp 619,420,459,629. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 0,032% dari nilai total penerimaan pajak negara selama tahun 2024.

e. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- a) Pengawasan pembayaran masa (PPh Pasal 25, Pasal 29 dan PPN) melalui surat imbauan kepatuhan formal dan material dan penerbitan SP2DK atas penurunan data perpajakan tahun berjalan;
- b) Melakukan kegiatan kunjungan lapangan (visit) dalam rangka *profiling* atau menindaklanjuti SP2DK;
- c) Melakukan komunikasi persuasif via telepon atau *whatsapp* untuk mendorong kepatuhan pembayaran dan pelaporan;
- d) Melakukan inventarisasi WP yang seharusnya mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 tetapi tidak/kurang dibayar dan menindaklanjutinya surat imbauan;
- e) Melakukan kegiatan *canvassing* (penyisiran WP) di beberapa kawasan ekonomi dengan menggunakan aplikasi MATOA untuk ekstensifikasi dan optimalisasi potensi perpajakan dari sektor kewilayahan antara lain di Jl. Pondok Kopi Raya, Jl. Raden Inten, Jl. Pondok Kelapa Raya, Jl. Pahlawan Revolusi, Jl. Buaran Raya, Duren Sawit, dan Jl. Teratai, Malaka Sari.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target penerimaan di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :
 - a) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa yang baik;
 - b) Pengelolaan Komite Kepatuhan yang kompeten;
 - c) Adanya evaluasi rutin yang mendorong pegawai dapat memenuhi target kinerja dengan tepat waktu
 - d) Adanya revisi atau perubahan pada target APBN menjadi sebesar Rp721.410.247.000,00
- Selain faktor pendorong, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam mencapai target kinerja ini, diantaranya adalah :

- a) Tidak semua Wajib Pajak baru melakukan pembayaran pajak karena adanya batasan omset untuk dikenakan pajak, sedangkan mayoritas WP kewilayahan dalam kategori WP OP non karyawan adalah UMKM
- b) Jumlah data pada Daftar nominatif STP cukup banyak sehingga belum seluruhnya ditindaklanjuti

Atas munculnya beberapa hambatan tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya :

- a) Melakukan kegiatan *canvassing* secara berkelanjutan;
- b) Melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan berkelanjutan;
- c) Secara konsisten menindaklanjuti daftar nominatif STP secara berkelanjutan secara optimal atas dafnom yang telah diturunkan

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Memanfaatkan fasilitas digitalisasi dan aplikasi digital untuk dapat mengoptimalkan kinerja dan mengurangi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi capaian kinerja, contohnya penggunaan MATOA untuk mempermudah kegiatan *canvassing*
- b) Secara berkelanjutan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja

4) Analisis pelaksanaan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja

Sebagai tindakan preventif untuk mencegah kegagalan pemenuhan capaian kinerja, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melakukan beberapa kegiatan mitigasi, diantaranya adalah :

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan penerimaan rutin yang dilaksanakan pada rapat pembinaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- b) Pembentukan Tim SINAR PARIS (Sinergi AR dan Fungsional Pemeriksa Pajak) sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak;
- c) Penyelenggaraan FERARI (Forum Edukasi AR dan FPP) sebagai wadah untuk melakukan bedah kasus Wajib Pajak;

5) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala utama yang ada adalah kondisi ekonomi Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Jakarta Duren Sawit serta jenis Wajib Pajak yang sebagian besar adalah

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha UMKM dan masih belum memiliki omzet yang stabil. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi penerimaan yang menjadi dasar penghitungan IKU ini. Atas adanya kendala ini, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk terus mengupayakan berbagai kegiatan pengawasan yang dapat mendorong tercapainya target penerimaan pembayaran masa.

6) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat capaian IKU sehubungan dengan GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

Tercapainya penerimaan yang optimal di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat mendukung berjalannya program RPJMN serta Rencana Strategis DJP, diantaranya adalah :

- a) Mendukung program pengarusutamaan gender sebagai proyek untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih kerap terjadi di Indonesia;
- b) Mendukung program pembangunan fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas serta pemberian insentif pada sektor yang dapat mempekerjakan penyandang disabilitas;
- c) Mendukung realisasi belanja sosial bagi pihak yang membutuhkan.

7) Analisis kontribusi IKU pada program pemerintah di bidang perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan

Dengan tercapainya target penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat membantu berjalannya program APBN, diantaranya adalah :

- a) Sebagai pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur negara yang berkenan dengan rehabilitasi ekosistem, subsidi atas perubahan iklim, serta pembiayaan infrastruktur hijau;
- b) Sebagai sumber anggaran Kesehatan untuk program perbaikan gizi yang dibuat oleh pemerintah;
- c) Sebagai sumber pembiayaan pemberdayaan perempuan;
- d) Sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, serta pemberian subsidi dan bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Konsisten menindaklanjuti daftar nominatif STP setiap bulan secara optimal sesuai dafnom yang telah diturunkan;
- 2) Menerbitkan STP di luar daftar nominatif STP setiap akhir triwulan;

- 3) Melakukan aktivitas pengumpulan data di beberapa kawasan ekonomi dengan memanfaatkan aplikasi MATOA untuk ekstensifikasi dan optimalisasi potensi perpajakan dari sektor kewilayahan antara lain:
 - Jl. Pondok Kopi Raya
 - Jl. Raden Inten
 - Jl. Pondok Kelapa Raya
 - Jl. Pahlawan Revolusi
 - Jl. Teratai Putih Malaka Sari dan
 - Kp. Bulak Klender
- 4) Mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baru terdaftar di tahun 2024-2025, baik pelaporan maupun pembayaran pajak Wajib Pajak pada DTP;
- 5) Melakukan inventarisasi WP yang seharusnya mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 tetapi tidak/kurang dibayar dengan memanfaatkan aplikasi DMP dan menindaklanjutinya dengan surat imbauan;
- 6) Penelitian potensi dinamisasi PPh Pasal 25 dan tindak lanjut berupa surat imbauan;
- 7) Melaksanakan pemanggilan/konseling kepada Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya, baik pelaporan dan penyetoran masanya dan membuat komitmen untuk penyetorannya;
- 8) Melakukan pengawasan atas potensi kewajiban pembayaran masa terutama PKP, PPh Pasal 21 TER dan setoran bendahara, PPh Pasal 25, PPh OP dan Badan, dan PPh Final;
- 9) Melakukan imbauan dan komunikasi persuasif yang intensif terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran masa yang belum dan akan dipenuhi;
- 10) Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan yang telah diturunkan dengan menerbitkan LHPT atau SP2DK.

4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	60,00%
Realisasi	93,32%	102,86%	102,86%	104,41%	104,41%	104,60%	104,60%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	116,00%	116,00%	104,60%	104,60%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b) Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- i. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
- ii. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- i. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- ii. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

2) Penjelasan Realisasi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 mencapai 104,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Sebaran realisasi pelaporan SPT Tahun 2024

Jenis SPT	Jumlah
SPT Badan	2.996
SPT OP 1770	3.505
SPT OP 1770S	41.334
SPT OP 1770SS	10.141
Total Lapor SPT	57.976

Sumber: MANDOR Dashboard Capaian Kinerja per 21 Januari 2025

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	104,60%	109,21%	102,58%	101,29%	80,44%

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dapat memenuhi target yang ditetapkan selama empat tahun, sejak 2021 sampai dengan 2024. Walaupun demikian, terdapat penurunan penerimaan di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana hal ini dikarenakan adanya perubahan definisi IKU dan komponen penghitungan IKU yang memperhitungkan pelaporan SPT tepat waktu sehingga menyebabkan adanya penurunan realisasi.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Target Tahun 2024 RPJMN
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	104,60%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	104,60%

e. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- Melakukan kegiatan layanan penerimaan SPT Tahunan melalui *e-Filing/e-Form* melalui loket *Helpdesk*, Pojok Pajak dan Layanan Tatap Muka;
- Penerbitan Surat Teguran dan STP kepada WP yang belum/tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh;
- Mengirimkan imbauan dengan whatsapp blast untuk WP Wajib SPT, dimana jumlah WP yang dikirimkan sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 22.611 WP;
- Melakukan imbauan secara langsung kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran NPWP baru atau mengajukan permohonan di TPT;
- Mengirimkan data Wajib Pajak Wajib SPT yang belum lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 untuk dilakukan *voice blast* ke Kanwil DJP Jakarta Timur sebanyak 1.500 WP;
- Amplifikasi pelaporan SPT (melalui kegiatan sosialisasi pada *tax gathering*, kelas pajak, *podcast* penyuluh, serta postingan media sosial resmi);
- Berkoordinasi dengan Fungsional Penyuluh dalam melakukan kelas pajak terkait bimbingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan;
- Membentuk Satgas Kepatuhan SPT Tahunan 2024 yang beranggotakan lintas Seksi dan telah bekerja sejak Januari 2024;
- Membuat program Agen Pajak yang beranggotakan Ketua RW untuk membantu menyebarkan informasi kepada warganya perihal pemadanan NIK-NPWP maupun mengingatkan pelaporan SPT Tahunan dan informasi penting lainnya;

- j) Mengirimkan *WhatsApp Blast* untuk mengingatkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan sekaligus menginfokan kegiatan Kelas Pajak rutin untuk asistensi pengisian SPT;
- k) Membuka pojok pajak di 14 titik meliputi Kecamatan, seluruh Kelurahan, RSKD Duren Sawit, Kemenag Jakarta Timur, dan Plaza Buaran;
- l) Mengadakan kegiatan pengisian SPT bareng sekaligus sosialisasi pemadanan NIK-NPWP di Kecamatan, seluruh Kelurahan, RSKD Duren Sawit, dan Kantor Kemenag Jakarta Timur;
- m) Mengadakan kegiatan Pekan Panutan yang melibatkan pimpinan tinggi di wilayah Duren Sawit meliputi Camat, seluruh Lurah, KaPolsek, DanRamil, Ka.UPPRD, dll;
- n) Membuat video testimoni pejabat di lingkungan Duren Sawit meliputi Camat, seluruh Lurah, Kepala Kemenag Jakarta Timur, *Influencer* (Gisella Anastasia), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang diunggah di akun media sosial resmi KPP untuk meningkatkan kesadaran publik;
- o) Memulai kegiatan penerimaan SPT di Luar KPP lebih awal, sejak Februari 2024;
- p) Membuat Surat Imbauan kepada Pemberi Kerja untuk menerbitkan Bukti Potong dan mengingatkan pegawainya agar melaporkan SPT Tahunan lebih dini.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :
 - a) Sinergi yang baik dari seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Duren Sawit mempercepat tercapainya target pelaporan SPT;
 - b) Penyusunan tim satgas serta pembuatan rencana kerja tim yang baik sehingga memudahkan monitoring atas rencana kerja tim satgas agar tetap terjadwal dan tepat waktu;
 - c) Dukungan dan antusiasme Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.
- Selain faktor pendorong, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam mencapai target kinerja ini, diantaranya adalah :

- a) Faktor jarak dan cuaca yang tidak dapat diprediksi sedikit menyulitkan Wajib Pajak yang akan berkonsultasi atau meminta bantuan untuk melakukan pelaporan, karena wilayah kerja dan alamat kantor yang cukup jauh;
- b) Gangguan layanan yang terjadi saat mendekati tenggat pelaporan SPT;
- c) Kurangnya literasi perpajakan pada beberapa pihak menyebabkan adanya Wajib Pajak yang tidak konsisten melakukan pelaporan SPT.

Atas munculnya beberapa hambatan tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya :

- a) Membuka saluran helpdesk secara online untuk memudahkan Wajib Pajak yang terkendala atau tidak dapat datang langsung ke KPP Pratama Jakarta Duren Sawit;
- b) Secara konsisten melakukan *WA blast* kepada Wajib Pajak sebagai reminder untuk melaporkan pajak sebelum batas pelaporan untuk mencegah adanya gangguan aplikasi;
- c) Membuka kelas pajak dan podcast oleh penyuluh yang mudah diakses masyarakat melalui media sosial resmi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

3) Analisa terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Memanfaatkan adanya RENJANI (Relawan Pajak Untuk Negeri) untuk membantu percepatan layanan pelaporan SPT;
- b) Mengoptimalkan kinerja tim satgas SPT Tahunan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit;
- c) Melakukan filter data Wajib Pajak yang akan dilakukan *WA Blast* agar pesan yang dikirimkan tepat sasaran.

4) Analisis pelaksanaan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja

Sebagai tindakan preventif untuk mencegah kegagalan pemenuhan capaian pelaporan SPT, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melakukan beberapa kegiatan mitigasi, diantaranya adalah :

- a) Menyelenggarakan program pojok pajak;
- b) Menyelenggarakan pekan panutan;
- c) Mengadakan kelas pajak;

- d) Melakukan inklusi perpajakan berupa kegiatan TGTS (*Tax Goes To School*), TGTC (*Tax Goes To Campus*), dan Pajak Bertutur;
- e) Sosialisasi edukasi perpajakan oleh penyuluh secara *one on one* maupun *one to many*;
- f) Sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan media online dan offline

5) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala utama yang ada adalah kurangnya literasi pajak dari beberapa Wajib Pajak berupa ketidaktahuan pengisian SPT, tidak memiliki EFIN, serta belum memiliki sarana yang memadai secara personal sehingga membutuhkan bantuan dari petugas dalam pelaporan SPT. Untuk itu, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk melakukan pendekatan dan mengadakan pojok pajak di kantor kelurahan yang ada di wilayah Duren Sawit yang mudah dijangkau oleh Wajib Pajak sehingga akan memudahkan akses Wajib Pajak yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Melakukan imbauan kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT Tahunan baik secara langsung maupun melalui media telepon, *whatsapp blast* sekitar 28.500 WP yang dilakukan secara periodik setiap bulan;
- 2) Melaksanakan Pojok Pajak di beberapa lokasi, yaitu :
 - 8 Kantor Kelurahan yang ada di Wilayah KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
 - Buaran Plaza
- 3) Menerbitkan Surat Teguran terhadap WP yang belum memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan, dan menetapkan target penerbitannya tahun 2025 untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- 4) Menerbitkan STP atas ketidakpatuhan pelaporan SPT Tahunan;
- 5) Menerbitkan surat imbauan penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak NE yang terdapat data;
- 6) Melakukan usulan Wajib Pajak Non Efektif secara selektif dan sesuai ketentuan untuk mitigasi risiko kepatuhan dan target kepatuhan;
- 7) Secara konsisten menjawab pertanyaan dan permohonan EFIN/SPT dari Wajib Pajak melalui tatap muka atau saluran yang telah disediakan KPP;
- 8) Amplifikasi pelaporan SPT;
- 9) Himbauan pelaporan SPT kepada Wajib Pajak;
- 10) Mengeluarkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang wajib lapor SPT namun belum melakukan pelaporan;

- 11) AR melakukan pengawasan dan menerbitkan STP secara berkala/rutin secara bersama-sama;
- 12) Berkoordinasi dengan Fungsional Penyuluh dalam melakukan kelas pajak terkait bimbingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan;
- 13) Penanganan terhadap WP Non Efektif (NE) untuk meringankan beban IKU Kepatuhan.

5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	25,00%
Realisasi	21,90%	36,98%	36,98%	58,50%	58,50%	100,64%	21,90%
Capaian	87,60%	73,95%	73,95%	78,00%	78,00%	100,64%	87,60%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di *assesment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi dari kegiatan PKM KPP Pratama Jakarta Duren Sawit adalah sebesar Rp103.732.011.170,00 dari nilai total target PKM sebesar Rp103.053.743.000,00 sesuai dengan sebaran target penerimaan pajak dari kegiatan PPM dan PKM KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada Nota Dinas nomor ND-2526/WPJ.20/2024 tanggal 31 Desember 2024. Sesuai dengan nilai realisasi tersebut, capaian IKU penerimaan dari kegiatan PKM tersebut adalah sebesar 100,64%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,64%	57,59%	96,54%	73,24%	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat mencapai target di Tahun 2024. Faktor besarnya target penerimaan PKM mengakibatkan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit kesulitan untuk dapat mencapai target IKU ini selama Tahun 2021 sampai dengan 2023. Dengan adanya perubahan target APBN di Tahun 2024, membantu KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat meraih capaian kinerja sebesar 100,64% di Tahun 2024.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Target Tahun 2024 RPJMN
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100%	100,64%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	100,64%

e. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- a) Menerbitkan 1.262 SP2DK atas DPP Kolaboratif dan DPP *Mandatory* Semester I dan Semester II tahun 2024;
- b) Menerbitkan 1.471 LHP2DK atas SP2DK yang diterbitkan baik dari SP2DK outstanding maupun DPP Kolaboratif dan DPP *Mandatory* Semester I dan Semester II tahun 2024;

- c) Melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas data Wajib Pajak yang telah menerbitkan Faktur Pajak namun tidak melakukan pembayaran dan pelaporan selain tahun berjalan;
- d) Menginventarisasi potensi pajak yang berasal dari data pembayaran, pelaporan, transaksi dan data pemicu lainnya untuk menjadi calon DPP selanjutnya;
- e) Melakukan *coaching*, mentoring dan konseling terhadap *Account Representative* secara konsisten untuk mendorong pencapaian kinerja PKM Pengawasan;
- f) Melaksanakan Forum *Account Representative* secara rutin sebagai wadah untuk berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman;
- g) Melakukan pendekatan persuasif kepada WP yang ternyata ATP nya rendah untuk dapat melakukan pembayaran atas SKP yang terbit sebelum JT pembayaran sesuai dengan kemampuan WP, sehingga ada nilai pembayaran yang dapat diakui sebagai kegiatan PKM Pemeriksaan;
- h) Mengajukan informasi rekening kepada PPATK untuk WP dengan nilai tunggakan di atas Rp. 1 M dan telah dijawab 3 WP dari 5 WP yang diajukan, namun tanpa informasi nilai saldo rekening.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi penerimaan PKM KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :
 - a) Adanya perubahan target penerimaan APBN sehingga menyebabkan adanya perubahan sebaran target penerimaan, termasuk penerimaan atas PKM;
 - b) Peran aktif Komite Kepatuhan yang mendorong tercapainya target realisasi penerimaan PKM;
 - c) Percepatan dan optimalisasi tindak lanjut atas SP2DK, DPP Kolaboratif, dan DPP *Mandatory*.
- Selain faktor pendorong, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam mencapai target kinerja ini, diantaranya adalah :
 - a) Kualitas sebaran SDM *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa Pajak yang tidak merata;

- b) Kualitas data yang kurang memadai;
- c) Kondisi keuangan Wajib Pajak yang memiliki Tingkat ketertagihan rendah.

Atas munculnya beberapa hambatan tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya :

- a) Peningkatan kualitas SDM dengan cara mengadakan diklat, PJJ, dan forum rutin;
- b) Peningkatan kualitas penyusunan DPP dengan memanfaatkan data DDRM, data CRM IRE, dan peningkatan analisis komprehensif atas potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak;
- c) Pemanfaatan aplikasi MATOA;
- d) Optimalisasi kegiatan penagihan pada kegiatan sita aset lancar milik penanggung pajak.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Memanfaatkan penggunaan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya yang digunakan;

4) Analisis pelaksanaan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja

Sebagai tindakan preventif untuk mencegah kegagalan pemenuhan capaian kinerja penerimaan PKM, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melakukan beberapa kegiatan mitigasi, diantaranya adalah :

- a) Menyelenggarakan FERARI (Forum Edukasi AR dan Fungsional Pemeriksa Pajak) dalam Bedah Kasus WP;
- b) Rutin mengoptimalkan rapat Komite Kepatuhan;
- c) Pengusulan digital forensik ke Kanwil DJP Jakarta Timur
- d) Melakukan pemantauan kepada FPP terkait jatuh tempo penyelesaian pemeriksaan, utamanya Pemeriksaan Khusus atas DSPP.

5) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala utama yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit adalah rendahnya pencairan hasil pemeriksaan yang menjadi komponen atas realisasi penerimaan PKM. Banyak Wajib Pajak yang berkomitmen melakukan pembayaran tetapi hingga lewat satu bulan sejak produk hukum diterbitkan, tunggakan tersebut belum dibayarkan. Hal ini tentu sangat mempengaruhi realisasi PKM utamanya

dari kegiatan P2 Gakum (Pemeriksaan dan Penagihan). Untuk hal ini, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk tetap melakukan konseling saat dilakukan pemeriksaan, agar Wajib Pajak tetap melakukan pembayaran walaupun tidak memiliki aset untuk melakukan pelunasan. Nilai yang dibayarkan Wajib Pajak tersebut tentu akan sangat membantu realisasi penerimaan PKM walaupun Wajib Pajak tidak langsung melunasi tunggakan pajak hasil pemeriksaannya.

8) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat capaian IKU sehubungan dengan GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

Tercapainya penerimaan PKM di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat mendukung berjalannya program RPJMN serta Rencana Strategis DJP, diantaranya adalah :

- a) Mendukung program pengarusutamaan gender sebagai proyek untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih kerap terjadi di Indonesia;
- b) Mendukung program pembangunan fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas serta pemberian insentif pada sektor yang dapat mempekerjakan penyandang disabilitas;
- c) Mendukung realisasi belanja sosial bagi pihak yang membutuhkan.

9) Analisis kontribusi IKU pada program pemerintah di bidang perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan

Dengan tercapainya target penerimaan PKM KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat membantu berjalannya program APBN, diantaranya adalah :

- a) Sebagai pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur negara yang berkenaan dengan rehabilitasi ekosistem, subsidi atas perubahan iklim, serta pembiayaan infrastruktur hijau;
- b) Sebagai sumber anggaran Kesehatan untuk program perbaikan gizi;
- c) Sebagai sumber pembiayaan pemberdayaan perempuan;
- d) Sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, serta pemberian subsidi dan bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Meningkatkan kualitas penyusunan DPP dengan mengoptimalkan pemanfaatan DDRM dan data CRM IRE serta melakukan analisis komprehensif terhadap potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak;

- 2) Melakukan penggalan potensi selain tahun berjalan di luar DPP dengan menerbitkan surat imbauan dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk memperoleh realisasi pembayaran;
- 3) Melakukan kegiatan pengumpulan data di beberapa sentra ekonomi untuk optimalisasi potensi perpajakan dari sektor kewilayahan dengan memanfaatkan aplikasi MATOA;
- 4) Melakukan akselerasi terhadap realisasi SP2DK dengan mengintensifkan komunikasi persuasif, konseling dan kunjungan kerja ke Wajib Pajak, dan pemberian solusi pembayaran secara berkala oleh Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan bayar WP tersebut;
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengusulkan diklat atau PJJ; melaksanakan forum AR secara rutin; melakukan pendampingan/pairing antara AR lama yang memiliki realisasi kerja bagus dengan AR yang baru;
- 6) Tindakan Penagihan dioptimalkan s.d sita aset Wajib Pajak serta aset Penanggung Pajak;
- 7) Mengirimkan surat ke PPATK untuk bantuan informasi rekening Wajib Pajak dengan tunggakan lebih dari 1 Milyar rupiah;
- 8) Meningkatkan produksi KKA Mandiri sebagai bahan baku pemeriksaan;
- 9) Meningkatkan kualitas dan sumber bahan baku dengan menindaklanjuti DSPP Rekomendasi dan SP2DK usul pemeriksaan

6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	10,00%
Realisasi	40,57%	84,64%	84,64%	85,10%	85,10%	88,80%	40,57%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah

perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian

jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah adanya perubahan perilaku pelaporan; melakukan pelaporan SPT masa yang telah jatuh tempo; atau melakukan pelaporan SPT tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

Perubahan Perilaku Pembayaran terdiri dari kriteria :

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

c) Formula IKU

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi dari perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 mencapai 88,80% dari target capaian sebesar 74,00% di akhir tahun 2024. Capaian tersebut diperoleh dari 18,50% proporsi kegiatan penyuluhan, 42,18% perubahan perilaku bayar, dan 28,12% perubahan perilaku lapor. Nilai realisasi dari masing – masing komponen perhitungan tersebut dapat dirinci melalui tabel berikut ini :

Gambar 3. 2 Tabel penghitungan realisasi IKU Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Kegiatan					Perubahan Perilaku				Rasio			Capaian IKU		
	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%		Target	Perubahan Perilaku	%		Capaian	Proporsi		Trajektori	Realisasi
Tema1	4	5	4		Bayar	110	82	74,55%	Kegiatan	100,00%	18,50%	Q1	10,00%	120,00%
Tema2	18	43	18		Lapor	110	55	50,00%	Perubahan Perilaku			Q2	40,00%	120,00%
Tema3					Σ Nominal Bayar				Bayar	74,55%	42,18%	Q3	60,00%	120,00%
One to One	10	183	10		2,106,232,902.00				Lapor	50,00%	28,12%	Q4	74,00%	120,00%
One to Many	10	12	10											
Total	40	243	40	100,00%										
										Total	88,80%			

Sumber : MANDOR per tanggal 15 Januari 2025

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	88,80%	84,00%	N/A	N/A	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan baru terdapat di tahun 2023 dan tahun 2024. Pada kedua tahun ini, IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat memenuhi target dan mengalami kenaikan realisasi di tahun 2024.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- Melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk melaksanakan 168 kegiatan penyuluhan pada tema III termasuk didalamnya 55 kegiatan DSPT dan 94 Berita Acara WRA sampai dengan Triwulan IV 2024;
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja penyuluhan yang telah dibuat yaitu penyuluhan tema III baik *one on one* maupun *one to many*;
- Melaksanakan kunjungan kepada Wajib Pajak DSPT Kolaboratif yang belum memberikan tanggapan sebanyak 33 Wajib Pajak;
- Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan melalui perekaman pada aplikasi Sisuluh;
- Menggunakan CRM Penyuluhan, CRM IRE, dan *Smartboard* 3.0 Mandor sebagai alat bantu untuk menentukan 55 DSPT untuk Triwulan I dan II serta 55 DSPT untuk Triwulan III dan IV (total 1 tahun ada 110 DSPT);
- Memberikan layanan konsultasi secara luring melalui 2 loket *Helpdesk* dan konsultasi secara daring melalui *WhatsApp* pada 3 nomor layanan;
- Menyelesaikan permohonan administrasi perpajakan tepat waktu;
- Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan sosialisasi perpajakan seperti kelas pajak bendahara Instansi pemerintah maupun pemberi kerja terkait Pajak TER, pemadanan NIK-NPWP, CTAS serta pelaporan SPT Tahunan, melibatkan pemerintah setempat untuk melakukan

kegiatan BDS (*Business Development Services*) untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usaha yang dimiliki, serta lembaga pendidikan untuk memberikan informasi perpajakan sejak dini kepada calon wajib pajak (siswa/mahasiswa).

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :
 - a) Kerja sama yang masif dengan berbagai pihak untuk mendukung terlaksananya program penyuluhan;
 - b) Menyediakan fasilitas penyuluhan yang mudah diakses oleh khalayak umum untuk dapat meraih lebih banyak responden;
 - c) Optimalisasi tindak lanjut daftar DSPT Kolaboratif dan melaksanakan kunjungan atas Wajib Pajak yang belum memberikan tanggapan.
- Selain faktor pendorong, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam mencapai target kinerja ini, diantaranya adalah :
 - a) Partisipasi pihak ketiga yang belum seluruhnya optimal sehingga informasi perpajakan ada yang tidak dapat tersampaikan secara cepat kepada masyarakat secara menyeluruh;
 - b) Perubahan ketentuan pajak yang cepat dan dinamis sehingga harus segera diimplementasikan dan disampaikan kepada Wajib Pajak;
 - c) Antusiasme masyarakat yang kurang atas materi perpajakan yang disampaikan pada kelas pajak.

Atas munculnya beberapa hambatan tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya :

- a) Pemberian fasilitas penyuluhan yang lebih banyak, berupa layanan luring pada loket *helpdesk* serta layanan daring berupa *Whatsapp* konsultasi yang dijawab langsung oleh penyuluh;
- b) Bekerja sama dengan instansi lain dalam melaksanakan sosialisasi terkait perpajakan, seperti kelas pajak khusus bendahara;

- c) Melibatkan pemerintah daerah Duren Sawit untuk pelaksanaan kegiatan dan program penyuluhan, seperti BDS (*Business Development Services*) dan sejenisnya.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Optimalisasi penyelesaian permohonan administrasi pajak yang perlu diselesaikan oleh penyuluh, sehingga manajemen waktu untuk kegiatan penyuluhan lain akan lebih efektif;
- b) Membuat rencana kerja penyuluhan sesuai dengan tema yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan penyuluhan akan terarah;
- c) Menyusun rencana kerja penyuluhan *one to many* dan *one on one*.

4) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala utama pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah rendahnya tingkat antusiasme serta partisipasi Wajib Pajak untuk mengikuti kelas pajak, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada DJP karena adanya kasus yang melibatkan ASN Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tetap berkomitmen untuk menarik minat Wajib Pajak untuk ikut serta dalam kegiatan penyuluhan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Selain itu, dalam melaksanakan pekerjaan sehari – hari penyuluh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit juga berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjaga rasa minat dan kepuasan Wajib Pajak pada kualitas pelayanan dan penyuluhan yang diberikan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Meningkatkan kualitas pemilihan wajib pajak yang akan diundang untuk mengikuti kelas pajak sesuai tema edukasi dengan mengajukan permintaan data kepada seksi PKD;
- 2) Menginformasikan kegiatan kelas pajak melalui media sosial dilengkapi dengan tautan, kontak, dan informasi pendaftaran serta mengirimkan undangan melalui nomor handphone wajib pajak terdaftar;
- 3) Materi penyuluhan perpajakan difokuskan pada informasi yang mudah diakses atau didapatkan, dilengkapi grafis menarik, singkat namun jelas dan mudah dipahami (konten media sosial, video tutorial, buku panduan);
- 4) Segera mempelajari perubahan terkait peraturan, update aplikasi, dan/atau ketentuan untuk disampaikan kepada wajib pajak, secara aktif mengikuti bimbingan teknis yang diberikan oleh Kantor Pusat, secara aktif mencari tahu informasi melalui grup internal maupun artikel-artikel perpajakan;
- 5) Menyelesaikan permohonan administrasi perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku, menindaklanjuti usulan/ masukan masyarakat yang diterima melalui hasil survei, serta secara aktif meneruskan konten positif terkait peran pajak pada akun media sosial resmi KPP.

7. IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	78 (5%)	78 (5%)	78 (5%)	78 (5%)	78 (5%)	82 (85%)	82 (100%)
Realisasi	6,11%	12,22%	12,22%	18,84%	18,84%	107,32	107,32
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	107,32	107,32

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan *stakeholders* lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan, terkait tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh KPP;
- Survei efektivitas penyuluhan, terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP;
- Survei efektivitas kehumasan, terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c) Formula IKU

Indeks Hasil Survei

2) Penjelasan Realisasi IKU

Hasil indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2024 adalah sebesar 89,32. Hasil tersebut dengan memperhitungkan nilai survei kepuasan pelayanan sebesar 90,12 dan hasil efektivitas penyuluhan sebesar 82,21. Dengan nilai tersebut, capaian IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2024 adalah sebesar 107,32%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	89,32	81,58	91,89	88,50	86,59

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit selalu mencapai target selama lima tahun sejak 2020.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%	-	82 (100%)	89,32

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja penyuluhan yang telah dibuat dengan melaksanakan 32 kegiatan kelas pajak, 114 kegiatan penyuluhan untuk perubahan perilaku, 2 *IG Live*, dan 2 *podcast* "Bijak Berduit" (Bincang Pajak Bersama KPP Pratama Jakarta Duren Sawit);
- b) Melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk melaksanakan 4 kegiatan sosialisasi Sadar Pajak untuk penyuluhan pada tema I, 28 kegiatan kelas pajak untuk penyuluhan tema II serta 114 kegiatan penyuluhan pada tema III termasuk didalamnya 55 kegiatan DSPT dan 30 kegiatan WRA sampai dengan Triwulan III;
- c) Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perpajakan untuk 1 kelas pajak bendahara, 6 kelas pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi baru, 9 kelas pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 12 kelas pajak bagi Wajib Pajak Badan terdaftar;
- d) Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan kelas pajak, 114 kegiatan penyuluhan untuk perubahan perilaku, 2 *IG Live*, dan 2 *podcast* "Bijak Berduit" (Bincang Pajak Bersama KPP Pratama Jakarta Duren Sawit);
- e) Menggunakan CRM Penyuluhan sebagai alat bantu untuk menentukan 55 DSPT untuk Triwulan I dan II serta 55 DSPT untuk Triwulan III dan IV (total 1 tahun ada 110 DSPT);
- f) Memberikan layanan konsultasi secara luring melalui 2 loket Helpdesk dan konsultasi secara daring melalui *WhatsApp* pada 3 nomor layanan serta penyelesaian permohonan administrasi perpajakan tepat waktu;
- g) Melaksanakan 2 kegiatan *IG live* terkait pemadanan NIK-NPWP dan Kegiatan Sadar Pajak. Membuat 2 *podcast* pada kanal *YouTube* sampai dengan Triwulan III mengenai Pajak TER dan Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi;
- h) Melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan dengan mengadakan kelas pajak terkait Pajak TER, Pemadanan NIK-NPWP, *CoreTax*. Serta mengadakan BDS dan Forum Pelayanan Publik bekerja sama dengan Kecamatan Duren Sawit pada triwulan III;
- i) Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan sosialisasi perpajakan seperti kelas pajak bendahara Instansi pemerintah maupun

pemberi kerja terkait Pajak TER, pemadanan NIK-NPWP, *CoreTax* serta pelaporan SPT Tahunan;

- j) Melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui 32 kelas pajak tema II, menyelesaikan pelaksanaan 55 DSPT Triwulan I dan II, 30 kegiatan penyuluhan Wajib Pajak WRA serta 29 kegiatan penyuluhan *one on one* serta *one to many* bagi WP OP dan WP Badan Terdaftar, 2 *IG Live* dan 2 *Podcast*.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :
 - a) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang masif sesuai dengan jadwal serta rencana kerja yang telah dibuat;
 - b) Adanya optimalisasi penyelesaian administrasi penyuluhan serta pelayanan;
 - c) Kerja sama yang masif dengan instansi lain maupun pihak ketiga untuk dapat melaksanakan sosialisasi serta program pelayanan serta penyuluhan dengan baik.
- Selain faktor pendorong, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam mencapai target kinerja ini, diantaranya adalah :
 - a) Kurangnya antusiasme dan pemahaman Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi serta ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - b) Respon rate Wajib Pajak yang masih rendah atas undangan kegiatan pajak serta permintaan pengisian survei maupun umpan balik untuk KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Atas munculnya beberapa hambatan tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya :

- a) Pemberian fasilitas penyuluhan yang lebih banyak, berupa layanan luring pada loket *helpdesk* serta layanan daring berupa *Whatsapp* konsultasi yang dijawab langsung oleh penyuluh;
- b) Bekerja sama dengan instansi lain dalam melaksanakan sosialisasi terkait perpajakan, seperti kelas pajak khusus bendahara;

- c) Melibatkan pemerintah daerah Duren Sawit untuk pelaksanaan kegiatan dan program penyuluhan;
- d) Optimalisasi penyelesaian administrasi pelayanan.

3) Analisa terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Optimalisasi penyelesaian permohonan administrasi pajak yang perlu diselesaikan oleh penyuluh maupun pelayanan, sehingga manajemen waktu untuk kegiatan lain akan lebih efektif;
- b) Membuat rencana kerja penyuluhan dan pelayanan;
- c) Secara berkelanjutan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil kinerja penyuluh dan pelaksana pelayanan.

4) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala utama pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah rendahnya tingkat antusiasme serta partisipasi Wajib Pajak dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Duren Sawit atas kewajiban perpajakan dan ketentuan pajak terbaru. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama Jakarta Duren Sawit secara intens melakukan kegiatan penyuluhan terkait ketentuan pajak terbaru, serta berusaha mengoptimalkan interaksi dengan Wajib Pajak maupun pihak eksternal lain melalui kegiatan resmi (TGTS, TGTC, Pajak Bertutur) untuk menarik minat masyarakat untuk lebih mengetahui tentang perpajakan Indonesia.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Melaksanakan kegiatan penyuluhan yang telah disusun sesuai dengan rencana kerja meliputi kegiatan penyuluhan dua arah atau satu arah, baik secara langsung maupun tidak langsung pada Triwulan IV berupa 4 kegiatan penyuluhan bagi Calon Wajib Pajak (Patur, TGTS, TGTC), 5 kelas pajak Tema II bagi WP OP, WP Badan serta Bendahara, 55 DSPT, 9 WRA yang sudah berjalan sejak Triwulan III;
- 2) Menyusun materi edukasi bagi WP dalam bentuk cetakan dan/atau digital terutama bagi Wajib Pajak yang membutuhkan berupa *leaflet* berupa *Billing* Pembayaran, Hak & Kewajiban Wajib Pajak, Pelaporan SPT, Pemadanan NIK-NPWP, Pajak TER;

- 3) Mempelajari perubahan terkait peraturan, aplikasi, dan/atau ketentuan untuk disosialisasikan kepada wajib pajak terkait Pajak TER, NPWP 16 Digit, CTAS, dan Peraturan Pelaporan SPT Masa Instansi Pemerintah serta sosialisasi kepada Lembaga Keuangan (AEOI);
- 4) Menyelesaikan permohonan administrasi perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Memberikan layanan konsultasi perpajakan secara luring dan daring melalui 2 loket Helpdesk dan 3 nomor layanan konsultasi perpajakan melalui *WhatsApp*;
- 6) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kegiatan BDS (*Bussiness Development Services*) yang akan mengundang narasumber dan peserta UMKM dalam rangka ikut mendorong kegiatan usaha seperti memberikan materi strategi marketing, branding, dsb;
- 7) Pelaksanaan sosialisasi pemadanan NIK NPWP melalui media kreatif (*podcast*);
- 8) Membuka saluran pendaftaran kelas pajak melalui link yang mudah diakses Wajib Pajak dan menyebarkan undangan penyuluhan baik melalui surat (pos), email, WA, dan media sosial resmi KPP.

8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	N/A	104,47%	104,47%	109,77%	109,77%	114,69%	114,69%
Capaian	N/A	116,08%	116,08%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

b) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan).
Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan).

c) Formula IKU

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase} & & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ \text{pengawasan} & & + \\ \text{pembayaran masa} & = & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)}) \end{array}$$

2) Penjelasan Realisasi IKU

Hasil Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2024 adalah sebesar 114,69%. Realisasi ini diperoleh dengan memperhitungkan 50% nilai realisasi strategis sebesar 111,80% dan 50% nilai realisasi kewilayahan sebesar 117,58%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase pengawasan pembayaran masa	114,69%	117,84%	105,45%	91,58%	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Jakarta Duren Sawit selalu mencapai target sejak 2021 dengan nilai capaian tertinggi pada 2023 yaitu sebesar 117,84%.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	-	90,00%	114,69%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- Atas daftar nominatif STP yang harus diterbitkan sebanyak 8.377 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 11.032 dengan nominal Rp10.217.399.510,00 serta menerbitkan Surat Teguran atas WP yang belum melaporkan SPT Tahunan;
- Melakukan penelitian atas PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan dicabut pengukuhanannya agar mengurangi daftar nominatif STP;
- Optimalisasi pencapaian target kuantitas dan kualitas DSE yaitu jumlah NPWP diterbitkan dan jumlah WP yang melakukan pembayaran;

- d) Melakukan Kegiatan Pengamatan Data Lapangan untuk mendukung kualitas dan menambah data DSE;
- e) Melakukan aktivitas *canvassing* (penyisiran WP) di beberapa kawasan ekonomi dengan menggunakan aplikasi MATOA untuk ekstensifikasi dan optimalisasi potensi perpajakan dari sektor kewilayahan antara lain di Jl. Pondok Kopi Raya, Jl. Raden Inten, Jl. Pondok Kelapa Raya, Jl. Pahlawan Revolusi, Jl. Buaran Raya, Duren Sawit, dan Jl. Teratai, Malaka Sari;
- f) Menerbitkan Daftar Nominatif Dinamisasi PPh Badan atas WP yang terdapat peningkatan omset PPNnya sebanyak 24 surat himbauan dinamisasi;
- g) Melakukan inventarisasi WP yang seharusnya mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 tetapi tidak/kurang dibayar dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat imbauan;
- h) Menindaklanjuti data perpajakan yang telah diturunkan pada aplikasi *Approweb* sebanyak 494 data dengan penerbitan 570 LHPt/SP2DK dan surat imbauan dan telah terealisasi sebanyak 494 Laporan (LHPt/LHP2DK).

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :
 - a) Optimalisasi tindak lanjut atas daftar nominatif STP serta mengoptimalkan tindak lanjut DSE dengan melakukan KPDL dan meningkatkan aktivitas *canvassing* dengan memanfaatkan aplikasi MATOA;
 - b) Mengoptimalkan tindak lanjut data yang diturunkan dengan penerbitan LHPt maupun LHP2DK.
- Selain faktor pendorong, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam mencapai target kinerja ini, diantaranya adalah :
 - a) Kualitas data DSE yang belum terlalu efektif untuk menjadi dasar penerbitan NPWP baru;
 - b) Daftar nominatif dinamisasi PPh Badan tahun pajak 2024 belum banyak diturunkan dan jumlah daftar nominatif dinamisasi PPh Badan tahun pajak 2023 masih relatif sedikit;
 - c) Nilai nominal potensi dalam daftar nominatif STP cukup besar tetapi tidak mencerminkan kualitas validitas materialnya.

Atas munculnya beberapa hambatan tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya :

- a) Melakukan penelitian atas PKP yang tidak aktif dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan usul pencabutan PKP secara jabatan;
- b) Melakukan optimalisasi tindak lanjut data DSE yang diperoleh untuk dapat menerbitkan NPWP dan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran;
- c) Melakukan optimalisasi atas daftar nominatif dinamisasi PPh Badan yang telah diturunkan dengan melakukan himbauan kepada Wajib Pajak;
- d) Mempercepat tindak lanjut data perpajakan yang diturunkan.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Memanfaatkan data digital dan aplikasi untuk efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya kantor;
- b) Merencanakan jadwal melakukan visit sebagai tindak lanjut penyelesaian data untuk meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran;
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

4) Analisis pelaksanaan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja

Sebagai tindakan preventif untuk mencegah kegagalan pemenuhan capaian kinerja penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melakukan beberapa kegiatan mitigasi, diantaranya adalah :

- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan penerimaan rutin yang dilaksanakan pada rapat pembinaan yang dilaksanakan setiap bulan;
- f) Pembentukan Tim SINAR PARIS (Sinergi AR dan Fungsional Pemeriksa Pajak) sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak;
- g) Penyelenggaraan FERARI (Forum Edukasi AR dan FPP) sebagai wadah untuk melakukan bedah kasus Wajib Pajak;
- h) Pelaksanaan rapat komite yang lebih berkualitas.

5) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Beberapa kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit di tahun 2024 untuk memenuhi target capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa diantaranya adalah :

- a) Jumlah data pada Daftar nominatif STP cukup banyak;
- b) Daftar nominatif STP belum mencakup seluruh sanksi administrasi terkait kepatuhan formal Wajib Pajak, yaitu tidak termasuk sanksi administrasi atas tidak/keterlambatan menyampaikan dan penyetoran SPT Tahunan;
- c) Banyak PKP yang secara faktual tidak memenuhi lagi persyaratan subjektif dan/atau objektif menjadi PKP, namun masih menjadi bagian data nominatif untuk diterbitkan STP;
- d) Penambahan WP baru masih bergantung pada suplai data DSE yang distribusinya di akhir semester;
- e) Terdapat perubahan komponen capaian IKU aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa pada pemanfaatan Data Perpajakan yaitu terdapat komponen kualitas sehingga SP2DK yang diterbitkan atas data perpajakan tahun berjalan harus diselesaikan sampai dengan penerbitan LHP2DK;
- f) Daftar Nominatif Dinamisasi PPh Badan Tahun Pajak 2024 belum diturunkan dan dinamisasi PPh Badan Tahun Pajak 2023 jumlahnya relatif sedikit

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk melakukan optimalisasi dan percepatan dalam melaksanakan tindak lanjut dari daftar nominatif serta data DSE dengan meningkatkan sinergi dengan Komite Kepatuhan sehingga akan mempercepat tindak lanjut yang dibutuhkan.

6) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat capaian IKU sehubungan dengan GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

Tercapainya penerimaan yang optimal di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat mendukung berjalannya program RPJMN serta Rencana Strategis DJP, diantaranya adalah :

- a) Mendukung program pengarusutamaan gender sebagai proyek untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih kerap terjadi di Indonesia;
- b) Mendukung program pembangunan fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas serta pemberian insentif pada sektor yang dapat mempekerjakan penyandang disabilitas;

- c) Mendukung realisasi belanja sosial bagi pihak yang membutuhkan.

7) Analisis kontribusi IKU pada program pemerintah di bidang perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan

Dengan tercapainya target penerimaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat membantu berjalannya program APBN, diantaranya adalah :

- a) Sebagai pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur negara yang berkenaan dengan rehabilitasi ekosistem, subsidi atas perubahan iklim, serta pembiayaan infrastruktur hijau;
- b) Sebagai sumber anggaran Kesehatan untuk program perbaikan gizi;
- c) Sebagai sumber pembiayaan pemberdayaan perempuan;
- d) Sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, serta pemberian subsidi dan bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Konsisten menindaklanjuti daftar nominatif STP setiap bulan secara optimal sesuai dafnom yang telah diturunkan;
- 2) Menerbitkan STP di luar daftar nominatif STP setiap akhir triwulan;
- 3) Melakukan cleansing PKP secara rutin bagi PKP yang sudah tidak memenuhi kriteria;
- 4) Melakukan penelitian dan adjusment atas DSE rekomendasi yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP sebanyak 83 data serta mengusulkan DSE Kolaboratif Semester I Tahun 2025;
- 5) Menambah usulan DSE Kolaboratif dari bahan DSE berpotensi tahun sebelumnya yang statusnya masih dalam proses;
- 6) Melakukan kegiatan pengumpulan data di beberapa kawasan ekonomi dengan menggunakan aplikasi MATOA untuk ekstensifikasi dan optimalisasi potensi perpajakan dari sektor kewilayahan antara lain Jl. Pondok Kopi Raya, Jl. Raden Inten, Jl. Pondok Kelapa Raya, Jl. Pahlawan Revolusi, Jl. Dermaga Raya, Malaka Sari dan Kp. Bulak Klender;
- 7) Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan sebanyak 74 LHPT/SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK;
- 8) Menindaklanjuti/merealisasikan dinamisasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25 Badan sesuai dafnom;
- 9) Melakukan inventarisasi WP yang seharusnya mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 tetapi tidak/kurang dibayar dan menindaklanjutinya surat imbauan.

9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	99,60%	99,60%	95,33%	95,33%	117,35%	117,35%
Capaian	N/A	99,60%	99,60%	95,33%	95,33%	117,35%	117,35%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- ❖ Komponen Penelitian (40%)

❖ Komponen Tindak Lanjut (60%)

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berdasarkan Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- ❖ Komponen Kuantitas (40%)
- ❖ Komponen Kualitas (60%)

c) Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

2) Penjelasan Realisasi IKU

Hasil Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2024 adalah sebesar 117,35% Realisasi ini diperoleh dengan memperhitungkan 50% nilai realisasi strategis sebesar 114,69% dan 50% nilai realisasi kewilayahan sebesar 120,00%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	117,35%	136,74%	118,41%	120,00%	106,95%

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit selalu mencapai target sejak 2020 dengan nilai capaian tertinggi pada 2023 yaitu sebesar 136,74%.

Adanya keterbatasan dan permasalahan terkait kemampuan bayar Wajib Pajak mempengaruhi penurunan realisasi di tahun 2024.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100,00%	117,35%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- a) Melakukan tindak lanjut secara tuntas atas SP2DK *Outstanding* dan SP2DK atas DPP Semester I & II tahun 2024 dengan komunikasi dengan Wajib Pajak melalui *Whatsapp*, undangan konseling dengan tembusan pengurus, maupun visit termasuk ke domisili Pengurus, dimana telah menerbitkan 1.698 SP2DK dan 1.471 LHP2DK;
- b) Akselerasi penyelesaian SP2DK yang memiliki potensi, namun Wajib Pajak kurang kooperatif yang ditindaklanjuti dengan usulan pemeriksaan khusus, data konkret atau pemeriksaan bukti permulaan;
- c) Melakukan penelitian dan *adjustment* atas DPP rekomendasi yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP serta mengusulkan DPP Kolaboratif Semester I Tahun 2025 dengan DPP sebanyak 837 row data dan estimasi potensi sebesar Rp49.679.430.090,-;
- d) Optimalisasi penyelesaian SP2DK *open* dengan komunikasi persuasif yang intensif dengan WP, konseling dan/atau kunjungan kerja untuk segera dilakukan upaya pembayaran oleh WP, usulan pemeriksaan atau *close* tanpa realisasi;

- e) Melakukan *coaching*, mentoring dan konseling terhadap Account Representative secara konsisten untuk mendorong pencapaian kinerja PKM Pengawasan.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :
 - a) Komunikasi yang intensif serta pelaksanaan konseling dan visit Wajib Pajak yang dilaksanakan secara masif untuk mendorong tercapainya target tahun 2024;
 - b) Meningkatkan sinergi serta kerja sama untuk mencapai target kinerja;
 - c) Melaksanakan program *coaching* dan mentoring secara berkala dan berlanjut untuk menciptakan pengawasan yang konsisten terhadap capaian kinerja.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Memanfaatkan data digital dan aplikasi untuk efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya kantor;
- b) Merencanakan jadwal melakukan visit sebagai tindak lanjut penyelesaian data untuk meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran;
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

4) Analisis pelaksanaan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja

Sebagai tindakan preventif untuk mencegah kegagalan pemenuhan capaian kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melakukan beberapa kegiatan mitigasi, diantaranya adalah :

- a) Pembentukan Tim SINAR PARIS (Sinergi AR dan Fungsional Pemeriksa Pajak) sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak;
- b) Penyelenggaraan FERARI (Forum Edukasi AR dan FPP) sebagai wadah untuk melakukan bedah kasus Wajib Pajak;
- c) Pelaksanaan rapat komite yang lebih berkualitas.

5) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Beberapa kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit di tahun 2024 untuk memenuhi target capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan diantaranya adalah :

- a) Kemampuan bayar Wajib Pajak yang kurang baik sehingga mempengaruhi jangka waktu dan kualitas penyelesaian SP2DK;
- b) Penyebaran SDM Account Representative belum merata sehingga menyulitkan pemenuhan realisasi kerja.
- c) Pembatasan usulan DPP, dimana bahan baku hanya dibatasi dari CRM IRE sementara analisa dari CRM IRE memiliki kriteria dan data Wajib Pajak yang relatif kecil dengan *sucess rate* yang rendah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk melakukan Optimalisasi pemanfaatan CRM IRE disertai dengan analisis yang lebih komperhensif atas Wajib Pajak yang potensial.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Meningkatkan kualitas penyusunan DPP dengan mengoptimalkan pemanfaatan data CRM IRE dan DDRM sehingga jumlah WP akan bertambah, serta mengoptimalkan kegiatan analisis komprehensif terhadap potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak;
- 2) Melakukan akselerasi terhadap realisasi SP2DK yang terdiri dari SP2DK *outstanding* sebanyak 239 dan juga DPP Kolaborasi tahun 2025 dengan mengintensifkan komunikasi persuasif, konseling dan kunjungan kerja ke Wajib Pajak berdasarkan skala prioritas, serta menyelesaikan prosesnya dengan realisasi pembayaran, usulan pemeriksaan atau *close* tanpa realisasi;
- 3) Melakukan upaya komunikasi ekstra maupun visit terhadap pengurus dan pemegang saham untuk penggalan potensi WP Badan;
- 4) Membuat strategi dan melakukan manajemen waktu penyelesaian SP2DK dengan lebih cepat;
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengusulkan diklat atau PJJ; melaksanakan forum AR secara rutin; melakukan pendampingan/pairing antara AR lama yang memiliki realisasi kerja bagus dengan AR yang baru.

10. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	113,28%	113,28%	117,71%	117,71%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	113,28%	113,28%	117,71%	117,71%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti.

- Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

c) Formula IKU

-

2) Penjelasan Realisasi IKU

Hasil Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2024 adalah sebesar 120,00%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120,00%	120,00%	N/A	N/A	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Jakarta Duren Sawit selalu mencapai target sejak 2023 dan mampu berkomitmen menjaga nilai realisasi kinerja secara optimal pada angka 120,00%.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100,00%	120,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- a) Menindaklanjuti data pemicu di luar tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK atas usulan dalam DPP baik kolaboratif maupun *mandatory*, jika terindikasi memiliki potensi atau himbauan untuk yang tidak terdapat potensi. Data pemicu yang telah ditindaklanjuti AR sebanyak 299 data dan WP sebanyak 1.405 data;
- b) Menerbitkan surat imbauan pembetulan SPT baik masa maupun badan apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atas kurang bayar pajaknya sehingga pada *Approweb* data tersebut terbaca telah diselesaikan/ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak sendiri;
- c) Mengirimkan *email* atau mengisi pada link <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx> untuk data pemicu yang tidak dapat ditindaklanjuti karena kesalahan data yang diturunkan;
- d) Konsisten menindaklanjuti daftar nominatif STP setiap bulan secara optimal sesuai dafnom yang telah diturunkan, dimana telah diterbitkan 4.559 STP dengan nilai nominal Rp11.014.356.299,00

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

Tercapainya realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah optimalisasi penyelesaian daftar nominatif STP selain tahun berjalan.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Memanfaatkan data digital dan aplikasi untuk efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya kantor;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

4) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Beberapa kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit di tahun 2024 untuk memenuhi target capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan diantaranya adalah :

- a) Data yang diturunkan mendekati daluwarsa penetapan sehingga seringkali tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal khususnya untuk usulan pemeriksaan atau waktu untuk kunjungan lapangan;
- b) Kualifikasi dan kriteria untuk usulan pemeriksaan sangat selektif antara lain tahun pajak, nilai potensi, keberadaan WP dan ATP WP sehingga tidak semua data pemicu dapat ditindaklanjuti;
- c) Jumlah data pada Daftar nominatif STP cukup banyak sehingga belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk melakukan optimalisasi dan percepatan dalam melaksanakan tindak lanjut dari daftar nominatif dan data pemicu, serta melakukan bedah Wajib Pajak secara selektif dan memanfaatkan forum FERARI untuk dapat melakukan pembahasan Wajib Pajak secara lebih mendalam.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Melakukan tindak lanjut atas Data Pemicu selain tahun berjalan telah diturunkan sampai akhir Oktober 2024 dengan mengusulkan sebagai DPP *Mandatory* atau menerbitkan surat imbauan bagi WP yang tidak masuk DPP atau tidak terdapat potensi serta menindaklanjuti data konkret atas masa - masa sebelumnya;
- 2) Melakukan pemilihan data pemicu secara selektif dan tepat dengan melihat nilai potensi dan eksistensi WP untuk diterbitkan SP2DK melalui mekanisme DPP;
- 3) Melakukan pembahasan/bedah WP dengan Fungsional Pemeriksa melalui program FERARI sebelum data pemicu tersebut ditindaklanjuti dengan diusulkan ke DPP untuk dapat diterbitkan SP2DK;
- 4) Konsisten melakukan tindak lanjut atas daftar nominatif STP yang telah diturunkan sampai akhir Desember 2024.

11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	110,90%	110,90%	105,21%	105,21%	113,26%	113,26%
Capaian	120,00%	110,90%	110,90%	105,21%	105,21%	113,26%	113,26%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Komponen 1**

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- ❖ laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- ❖ laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

- ❖ laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- ❖ laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

- **Komponen 2**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Komponen 3**

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

c) Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

=

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi dari Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 113,26% dari target capaian sebesar 100,00% di akhir tahun 2024. Capaian tersebut diperoleh dari 18,50% proporsi sesuai dengan formula IKU di atas. Berdasarkan Nota Dinas nomor ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025 realisasi yang diperoleh oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit atas komponen I adalah sebesar 115,00%, komponen II sebesar 85,52%, dan komponen III sebesar 106,05%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	113,26%	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu baru terdapat di tahun 2024, dimana pada tahun 2024 ini pengelolaan Komite Kepatuhan cukup baik sehingga nilai realisasi kinerjanya dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100,00%	113,26%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- Melaksanakan tertib administrasi laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan WP di KPP dengan melaksanakan rapat Komite Kepatuhan sesuai kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan;
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dari semua proses bisnis untuk mendukung optimalisasi peran Komite Kepatuhan KPP;
- Menindaklanjuti penyelesaian SP2DK dengan diusulkan pemeriksaan khusus sebagai bahan DSPP rutin;
- Sampai Desember 2024 telah mengusulkan 80 usulan pemeriksaan khusus dengan nilai potensi Rp24,4 M dan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2 untuk memenuhi bahan baku sebesar 60.25%

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :
 - Adanya peningkatan peran Komite Kepatuhan dalam menentukan kebijakan dan program kerja atas pengamanan penerimaan yang membutuhkan penyesuaian dan koordinasi yang baik dari seluruh aktor;

- b) Adanya pemantauan atas penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material;
- c) Penyediaan bahan baku pemeriksaan yang baik, mulai dari profil Wajib Pajak itu sendiri maupun kualitas potensi yang dapat ditagih.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Melakukan pembahasan beberapa materi sekaligus saat melakukan rapat Komite Kepatuhan sehingga lebih efisien secara waktu;
- b) Memanfaatkan keberadaan aplikasi dan digitalisasi data untuk memudahkan proses pembahasan Wajib Pajak.

4) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Beberapa kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit terkait dengan pemenuhan IKU ini diantaranya adalah :

- a) Penurunan komponen DSP4 (DPP, DSPP, DSE, DPT, DSPC, DSPn) tidak bersamaan sehingga terdapat perbedaan timeline penyelesaian daftar setiap proses bisnis yang harus dibahas oleh Komite Kepatuhan KPP;
- b) Nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor yang lebih rendah dibanding nilai PKM pada apportal (menu MPN) sedangkan bobot nilai PKM adalah 40%;
- c) Potensi pajak pada saat usulan pemeriksaan tidak terealisasi karena Wajib Pajak tidak bisa membayar secara keseluruhan.

Atas beberapa kendala tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dari seluruh aktor Komite Kepatuhan demi mencapai seluruh komitmen dan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Konsisten melaksanakan tertib administrasi laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan WP di KPP;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi setiap anggota serta melaksanakan tugas komite kepatuhan sesuai dengan pekerjaan masing - masing secara tertib dan efektif;
- 3) Menjaga dan meningkatkan realisasi PKM dari proses bisnis Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan;
- 4) Peningkatan kualitas bahan baku pemeriksaan untuk mendukung pencapaian target PKM;
- 5) Seluruh aktor PKM rutin melakukan update data komitmen prognosa capaian PKM;
- 6) Mengusulan DSPP Kolaboratif untuk Wajib Pajak dengan potensi tinggi dan ATP tinggi dan tambahan usulan pemeriksaan WP lainnya baik dari DPP maupun dari analisis mandiri, WP Post Audit, dan WP RTLb untuk memenuhi realisasi pencairan pemeriksaan.

12. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	118,47%	118,00%	118,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	118,47%	118,00%	118,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

b) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c) Formula IKU

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian di tahun 2024 mencapai 120,00%. Capaian ini diperoleh dari nilai realisasi dari komponen efektivitas pemeriksaan dan penilaian yang masing – masing memiliki realisasi sebesar 120,00%. Sehingga, setelah dihitung berdasarkan persentase formula IKU diperoleh nilai realisasi tersebut.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120,00%	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian baru terdapat di tahun 2024. Pada empat tahun sebelumnya komponen yang diperhitungkan hanya sebatas efektivitas pemeriksaan saja tanpa memperhitungkan nilai efektivitas penagihan. Walaupun demikian, dengan hanya memperhitungkan komponen pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tetap mampu mencapai target efektivitas pemeriksaan.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100,00%	120,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- a) Memaksimalkan pembahasan di tingkat komite kepatuhan terhadap nilai potensi pada saat pengusulan pemeriksaan, sehingga didapat nilai potensi yang presisi dengan nilai SKP yang diterbitkan;
- b) Telah menyelesaikan 5 Laporan Penilaian dengan data berasal dari aset Wajib Pajak yang telah disita dan akan diajukan lelang.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah:
 - a) Peningkatan produktivitas Fungsional Pemeriksa Pajak dalam penyelesaian SP2 *Outstanding*;
 - b) Monitoring dan evaluasi kerja yang rutin dilakukan sehingga proses kerja tetap terjadwal dan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati;
 - c) Adanya sinergi yang kuat dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dengan Seksi Pengawasan dan Fungsional untuk dapat menciptakan hasil penilaian yang berkualitas.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Memanfaatkan aplikasi dan digitalisasi data untuk memudahkan pekerjaan sehari – hari guna percepatan penyelesaian dan manajemen waktu yang lebih baik;
- b) Meningkatkan sinergi dan kerja sama seluruh seksi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dengan mengikutsertakan pelaksana dari seksi yang lain untuk turut berpartisipasi sesuai kapasitasnya.

4) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Beberapa kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit terkait dengan pemenuhan IKU ini diantaranya adalah :

- a) Terdapat *gap* antara interaksi FPP dengan Wajib Pajak dan interaksi AR dengan Wajib Pajak saat SP2DK sehingga, saat terjadi pemeriksaan Wajib Pajak tidak lagi ditemukan pada alamat yang terdaftar;
- b) Kesanggupan bayar Wajib Pajak yang rendah sehingga pencairan hasil pemeriksaan masih rendah;
- c) Jangka waktu pembayaran SKP yang sebentar, sehingga menyebabkan pengakuan pencairan tidak maksimal;
- d) Bahan baku usulan penilaian belum sesuai standar pengusulan penilaian sehingga menyulitkan pemenuhan target bantuan penilaian.

Atas kendala tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk mengoptimalkan bahan baku yang ada untuk dapat memenuhi target pengusulan bahan baku penilaian. Serta mengupayakan untuk melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak untuk dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuannya.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Membuat LHP summier atas Wajib Pajak yang memang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan lapangan, baik di lokasi usaha WP, maupun di alamat penanggung pajak, sehingga penyelesaian pemeriksaan tidak melewati jangka waktu;
- 2) Konseling dengan WP agar membayar senilai pokok tunggakan;
- 3) Koordinasi dengan Seksi Pelayanan, begitu SKP dicetak agar segera di tindaklanjuti segera, sampai dengan pengiriman SKP;

- 4) Mencari bahan baku untuk 4 usulan penilaian dengan data support dari seksi PKD dan hasil visit AR di lapangan atas WP yang ada potensi KMS;
- 5) Melakukan pembahasan dengan penilai kanwil sebelum dilakukan usulan untuk mengetahui apakah transaksi yang akan diusulkan sesuai dengan standar pengusulan.

13. IKU Tingkat efektivitas penagihan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	25,55%	78,06%	78,06%	70,50%	70,50%	138,28%	138,28%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

c) Formula IKU

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ & (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ & (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC}) \end{aligned}$$

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi Tingkat Tingkat efektivitas penagihan di tahun 2024 mencapai 138,28%. Capaian ini diperoleh dari nilai realisasi dari variabel tindakan penagihan sebesar 74,77%, variabel tindak lanjut DSPC sebesar 27,20%, variabel pencairan DSPC sebesar 36,31%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Tingkat efektivitas penagihan	138,28%	85,72%	117,43%	116,52%	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan telah ada sejak tahun 2021, dan selama empat tahun ini KPP Pratama Jakarta Duren Sawit secara aktif melakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga nilai realisasi yang diperoleh selama empat tahun ini secara konsisten melebihi target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75,00%	138,28%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- Menindaklanjuti WP DSPC dan WP tunggakan besar lainnya sampai dengan Pemindahbukuan saldo rekening dengan realisasi Rp12.486.345.000,00;
- Melaksanakan Pencegahan kepada 6 WP;
- Melaksanakan Lelang Ruko dengan nilai Rp260.000.000,00;
- Melakukan himbauan pembayaran tunggakan melalui media elektronik kepada 1.300 WP dengan realisasi Rp111.977.711,00;

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi Tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah:
 - Sinergi aktif antara seluruh pegawai Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk dapat menindaklanjuti tindakan penagihan yang harus dijalankan, dan membantu JSPN untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi sehingga JSPN dapat lebih fokus untuk menyelesaikan tindakan penagihan aktif;
 - Monitoring dan evaluasi yang dijalankan secara rutin dan berkelanjutan

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- Melakukan visit secara terencana dan terjadwal sehingga pelaksanaan penagihan aktif dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat;

- b) Optimalisasi peranan pelaksana penagihan dalam mendukung kebutuhan administrasi JSPN.

4) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam memenuhi target realisasi IKU ini adalah realisasi pencairan WP DSPC belum memenuhi target PKM penagihan meskipun target aktifitas penagihan telah terpenuhi. Atas kendala tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk tetap mengoptimalkan bahan baku yang ada dan melakukan penggalian potensi pencairan penagihan kepada Wajib Pajak besar dan memiliki nilai tunggakan yang tinggi.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Membuat usulan 100 WP DSPC dan WP tunggakan besar lainnya untuk pemenuhan PKM Penagihan tahun 2025;
- 2) Penyiapan aktifitas penagihan melalui aplikasi *coretax*;
- 3) Melaksanakan Pembahasan WP usulan cegah dan sandera;
- 4) Melakukan himbauan melalui media elektronik kepada 1000 WP yang nilai tunggakan dibawah Rp10.000.000,00

14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	200,00%	200,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi *Approweb*/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota

Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi *Approweb*/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c) Formula IKU

$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}$	$\times 100\%$
--	----------------

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di tahun 2024 mencapai 200,00%. Capaian ini diperoleh dari nilai realisasi usulan Bukper tahun 2024 sebanyak 2 usulan dari target usulan penyampaian sebanyak 1 usulan.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	200,00%	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan hanya ada di tahun 2024.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	200,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- Melakukan pemetaan dan analisis data SP2DK yang memenuhi kriteria usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- Membuat ND Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan Faktur Pajak dan yang menyampaikan SPT tetapi tidak benar sebanyak 2 WP (PT Rass Mandiri Utama dan PT Teluk Banyu Energi) dari Seksi Pengawasan VI dan telah dilakukan pembahasan dengan Tim Kanwil sesuai ND-1498/WPJ.20/2024;
- Membuat ND Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan Faktur Pajak dan yang menyampaikan SPT tetapi tidak

benar atas nama PT Dinar Pargaulan dari Seksi Pengawasan V dan menunggu jadwal pembahasan dengan Tim Kanwil;

- d) Melakukan pembahasan atas 2 WP (PT.RMU dan PT. TBE) yang diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

- Tercapainya realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah:
 - a) Sinergi aktif antara seluruh pegawai serta optimalisasi peran dari Komite Kepatuhan untuk dapat memaksimalkan bedah Wajib Pajak yang berpotensi untuk diusulkan Bukti Permulaan;
 - b) Monitoring dan evaluasi yang dijalankan secara rutin dan berkelanjutan.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Memanfaatkan digitalisasi data untuk sumber bahan baku penggalian Wajib Pajak;
- b) Memanfaatkan fasilitas aplikasi untuk dapat memaksimalkan proses penggalian data.

4) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam memenuhi target realisasi IKU ini adalah Terdapat WP yang terindikasi melakukan pidana perpajakan tetapi potensinya dibawah 250 juta, WP tidak ditemukan, dan/ atau ATP nya rendah. Atas kendala tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk tetap mengoptimalkan bahan baku yang ada sebagai sumber pencarian Wajib Pajak yang potensial diusulkan Bukti Permulaan.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Mencari WP yang dapat diusulkan Bukper, yang memiliki potensi diatas 250 juta dan memiliki ATP tinggi;
- 2) Melakukan diskusi/pembahasan dengan Tim Kanwil atas usulan kolaborasi yang dapat ditingkatkan menjadi usulan Buper.

15. IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	19,63%	89,42%	89,42%	135,23%	135,23%	120,00%	120,00%
Capaian	98,13%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

c) Formula IKU

-

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan di tahun 2024 mencapai 120,00%. Capaian ini diperoleh dari nilai realisasi unsur pengamatan sebesar 120,00% dan unsur penyediaan data lapangan sebesar 120,00%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120,00%	120,00%	N/A	N/A	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan hanya ada di tahun 2023 dan 2024. Pada tahun – tahun sebelumnya, penghitungan IKU tidak mempertimbangkan realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan hanya memperhitungkan realisasi penyediaan data potensi perpajakan.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	120,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- Membentuk Tim Pengamatan tingkat KPP untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Melakukan pemetaan dan identifikasi profil Wajib Pajak yang layak untuk dilakukan pengamatan dari seluruh *core bussiness* KPP dari probis Pengawasan, Pemeriksaan maupun Penagihan;
- Melakukan 4 kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan II, Pengawasan III, Pengawasan V. dan Pengawasan VI

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

Tercapainya realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah:

- a) Sinergi aktif dan efektivitas kerja dari tim pengamatan tingkat KPP;
- b) Monitoring dan evaluasi yang dijalankan secara rutin dan berkelanjutan;
- c) Koordinasi dengan pihak lain, seperti Kanwil, KPDJP, maupun pihak lain yang berkompeten untuk mengoptimalkan realisasi.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Menyusun rencana kerja tim pengamatan agar realisasi berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

4) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam memenuhi target realisasi IKU ini adalah kegiatan pengamatan merupakan kegiatan yang memerlukan kualifikasi khusus untuk SDM dalam pelaksanaannya. Tidak semua *Account Representative* telah memiliki dasar kemampuan atau pengalaman dalam bidang pengamatan atau intelijen. Atas kendala tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk tetap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat menghasilkan laporan pengamatan yang berkualitas.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Mengadakan IHT atau Bimtek dengan narasumber dari pihak internal KPP dan/atau pihak eksternal (Kanwil);
- 2) Tim Eksekutor di lapangan melaksanakan kegiatan pengamatan dan penyediaan potensi perpajakan sesuai ketentuan;
- 3) Mengusulkan kegiatan pengamatan untuk WP yang terdapat indikasi ketidakwajaran laporan keuangan/SPT-nya;
- 4) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jakarta Timur apabila diperlukan;
- 5) Membuat rencana pengamatan di awal tahun dan melaksanakan sesuai rencana;

- 6) Melakukan kegiatan pengumpulan data di beberapa sentra ekonomi dengan menggunakan aplikasi MATOA untuk ekstensifikasi dan optimalisasi potensi perpajakan dari sektor kewilayahan antara lain Jl. Pondok Kopi Raya, Jl. Raden Inten, Jl. Pondok Kelapa Raya, Jl. Pahlawan Revolusi, Jl. Dermaga Raya, Malaka Sari dan Kp. Bulak Klender;
- 7) Menginventarisir Wajib Pajak yang tidak terdapat data NIK/NPWP dan meminta bantuan Kanwil untuk mendapatkan data-data dari pihak eksternal seperti ijin usaha, data Dukcapil, PGB, pajak daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengayaan data dan penggalan potensi pajak.

16. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	159,34%	131,97%	131,97%	131,97%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

• Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- ❖ Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- ❖ Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus

memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural;

- ❖ Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

- **Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c) Formula IKU

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$ Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan di tahun 2024 mencapai 120,00%. Capaian ini diperoleh dari nilai realisasi komponen kualitas kompetensi sebesar 103,49 dan realisasi komponen kegiatan kebintalan SDM sebesar 101,00.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	120,00%	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan hanya ada di tahun 2024.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100,00%	120,00%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- a) Memberikan bahan materi kepada pegawai yang mengikuti uji kompetensi

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

Tercapainya realisasi Persentase penyampaian usul Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah:

- a) Kerja sama dan sinergi pegawai yang baik sehingga seluruh hasil ukom memiliki realisasi nilai yang baik;
- b) Dukungan pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh seluruh pegawai sehingga realisasi kegiatan kebintalan sudah baik.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah :

- a) Melaksanakan kegiatan kebintalan yang terintegrasi dengan kegiatan lain sehingga mengoptimalkan efisiensi anggaran;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

4) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam memenuhi target realisasi IKU ini adalah adanya pejabat fungsional yang belum lulus ujian kompetensi dan ketentuan pelaksanaan bintal yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi kendala tersebut, atas fungsional yang belum lulus ujian diberikan jadwal kegiatan IDP untuk memaksimalkan hasil uji kompetensi, dan atas kendala pelaksanaan bintal dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan lain yang sesuai dengan tema yang harus dipenuhi.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Mendampingi pegawai yang akan mengikuti ujian kompetensi dengan memberikan materi ujian kompetensi;
- 2) Membuat rencana kegiatan IDP untuk pegawai yang tidak lulus UKOM;
- 3) Menginventarisir kembali kegiatan ICV yang dapat disinkronkan dengan kegiatan kebintalan.

17. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)
Realisasi	-	-	-	-	-	91,8	91,8
Capaian	-	-	-	-	-	108	108

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- pelayanan perpajakan;
- pengawasan kepatuhan;
- pemeriksaan pajak;
- penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6);
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c) Formula IKU

-

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit di tahun 2024 mencapai 108 dengan nilai indeks sebesar 91,8 dari target capaian sebesar 85 (skala 100).

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Indeks Penilaian Integritas Unit	91,8	94,21	94,73	93,15	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit hanya ada di tahun 2024.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	91,80

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- Melakukan pendataan berbagai macam survey berdasarkan data survei tahun lalu kemudian mempersiapkan *longlist* WP;
- Melakukan monitoring pengisian survey dengan memastikan bahwa setiap responden telah menerima *link* survei. Apabila terdapat responden yang belum mendapat *link* survei maka akan dilakukan *follow up* ke Direktorat Kitsda.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

Tercapainya realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit SDM KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah:

- Optimalisasi pelayanan Wajib Pajak baik secara luring maupun daring;
- Percepatan penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
- Perbaikan dan peningkatan kualitas layanan yang disediakan oleh kantor.

3) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam memenuhi target realisasi IKU ini adalah sulitnya mencari data *longlist* responden, banyaknya survei yang harus diisi oleh Wajib Pajak sehingga sulit untuk mencari Wajib Pajak yang bersedia mengisi survei, jangka waktu pengisian survei yang terlalu singkat. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama Jakarta Duren Sawit mengupayakan data *longlist* yang lebih banyak dari yang dibutuhkan dan disiapkan jauh – jauh hari sebelum batas waktu.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Mempersiapkan data longlist responden jauh jauh hari dan menginfokan kepada WP bahwa WP tersebut akan menjadi responden survei;
- 2) Melakukan koordinasi dengan seksi terkait

18. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	33,73%	48,66%	48,66%	70,24%	70,24%	98,80%	98,80%
Capaian	120,00%	103,53%	103,53%	100,34%	100,34%	109,37%	109,37%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

• **Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode

tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu. Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas *UPK-One*, *UPK-Two*, dan *UPK-Three*. Struktur *UPK-Three* terdiri atas:

- ❖ Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan *UPK-Three*;
- ❖ Administrator Kinerja Organisasi (AKO) *UPK-Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja *UPK-Three* yang memiliki tugas membantu KKO *UPK-Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- ❖ Administrator Kinerja Pegawai (AKP) *UPK-Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja *UPK-Three* yang memiliki tugas membantu KKP *UPK-Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- ❖ yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- ❖ yang bertindak selaku KKO *UPK-Three* dan KKP *UPK-Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- ❖ Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja;
- ❖ Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja.

- Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- ❖ Administrasi dan Pelaporan;
- ❖ Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

c) Formula IKU

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$$

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko di tahun 2024 mencapai 120,00%. Capaian ini diperoleh dari nilai realisasi komponen kualitas kompetensi sebesar 103,49 dan realisasi komponen kegiatan kebintalan SDM sebesar 101,00.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	98,43	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan hanya ada di tahun 2024, karena ada perbedaan pada metode penghitungan terkait IKU ini.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90,00%	98,80%

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- Membuat rencana pelaksanaan dan materi yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan imbauan kinerja;
- Menyampaikan Laporan Imbauan Kinerja Tepat Waktu;
- Melaksanakan DKRO sebelum tanggal 20 setelah triwulan berakhir;
- Memastikan bahwa Kepala Kantor hadir dalam rapat DKRO;
- Menindaklanjuti hasil evaluasi rapat DKO triwulan sebelumnya;
- Memastikan pelaksanaan identifikasi risiko, analisis risiko dan penentuan resiko prioritas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;

- g) Memastikan bahwa rencana aksi yang akan dilakukan sesuai dengan sasaran mitigasi resiko;
- h) Mengirimkan laporan MR tepat waktu;
- i) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Mitigasi Risiko setiap triwulan.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

Tercapainya realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah:

- a) Pelaksanaan mitigasi risiko yang terencana;
- b) Sinergi dalam penyusunan dokumen manajemen kinerja dan manajemen risiko.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa langkah efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit diantaranya adalah koordinasi yang masif dalam pemenuhan dokumen manajemen kinerja dan manajemen organisasi.

4) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam memenuhi target realisasi IKU ini adalah dokumen yang harus dipersiapkan cukup banyak (NKO, LCK, IS, LPKR, Matriks Tindak Lanjut, Risalah MR) sementara waktu penyelesaian cukup singkat. Untuk mengatasinya, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit bersinergi dengan seluruh aktor yang berperan serta dalam pemenuhan dokumen yang dimaksud.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Berkoordinasi dengan seksi terkait untuk percepatan penyelesaian pengisian data NKO, LCK, IS dan realisasi kegiatan MR).

19. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	103,43	100,90	102,21	98,06	98,06	120,00	120,00
Capaian	103,43%	100,90%	102,21%	98,06	98,06	120,00	120,00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2025

1) Narasi IKU

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian

Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c) Formula IKU

$$\begin{aligned} * \text{Koefisien } 0,2 &= (\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) \\ &= (95-91) / (120-100) \\ ** \text{Koefisien } 0,55 &= (\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80) \\ &= (91-80) / (100-80) \end{aligned}$$

2) Penjelasan Realisasi IKU

Nilai realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit di tahun 2024 mencapai 108 dengan nilai indeks sebesar 91,8 dari target capaian sebesar 85 (skala 100).

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2024	2023	2022	2021	2020
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120,00	98,34	93,27%	93,77%	95,04%

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2020 s.d. 2023

Dari tabel tersebut, realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat mencapai target sebanyak dua kali, pada tahun 2020 dan 2024.

c. Perbandingan antara target Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, RPJMN, dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 PK	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	100,00	120,00

d. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

1) Analisis upaya penunjang pencapaian kinerja

- Membuat perencanaan realisasi belanja modal yang lain selain perencanaan renovasi;
- Memaksimalkan penyerapan anggaran dari jenis belanja yang lain;
- Memaksimalkan indikator kinerja anggaran selain penyerapan anggaran.

2) Analisis program penunjang keberhasilan capaian kinerja

Tercapainya realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tidak luput dari beberapa faktor yang menjadi pendukung tercapainya target di tahun 2024, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah:

- Mengadakan rapat keuangan secara periodik;
- Menyusun rencana keuangan yang presisi.

3) Analisis kendala dan langkah penyelesaiannya

Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam memenuhi target realisasi IKU ini adalah sulitnya mencari data *longlist* responden, banyaknya survei yang harus diisi oleh Wajib Pajak sehingga sulit untuk mencari Wajib Pajak yang bersedia mengisi survei, jangka waktu pengisian survei yang terlalu singkat. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama Jakarta Duren Sawit mengupayakan data *longlist* yang lebih banyak dari yang dibutuhkan dan disiapkan jauh – jauh hari sebelum batas waktu.

4) Analisis pelaksanaan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja

Sebagai tindakan preventif untuk mencegah kegagalan pemenuhan efisiensi anggaran, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melakukan kegiatan preventif berupa rapat keuangan secara periodik.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Rapat tim keuangan secara periodik untuk membahas rencana keuangan setiap triwulan;
- 2) Mengajukan usulan revisi anggaran;
- 3) Merealisasikan belanja modal dari perencanaan renovasi sesuai dengan *timeline*

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, realisasi anggaran KPP Pratama Jakarta Duren Sawit mencapai Rp8.714.315.937,00 dari total alokasi anggaran sebesar Rp 9.139.809.000,00 atau mencapai 95,34%.

Nilai total realisasi tersebut terdiri dari 96,94% belanja pegawai, 95,98% belanja barang, dan 90,81% belanja modal. Dari rincian tersebut, nilai sisa anggaran KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2024 adalah sebesar Rp 425.493.063,00. Rincian realisasi belanja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit adalah sebagai berikut :

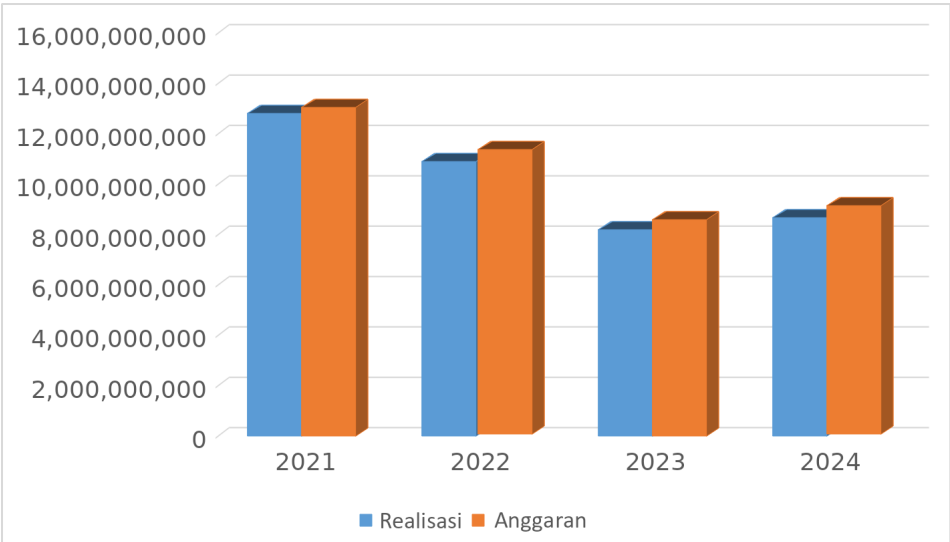
Gambar 3. 3 Tabel realisasi belanja satker per jenis belanja

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	410248 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	PAGU	882,960,000	6,973,581,000	1,283,268,000	0	0	0	0	0	0	9,139,809,000
		REALISASI	855,953,000 (96.94%)	6,693,074,768 (95.98%)	1,165,288,169 (90.81%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8,714,315,937 (95.34%)
		SISA	27,007,000	280,506,232	117,979,831	0	0	0	0	0	0	425,493,063
GRAND TOTAL		PAGU	882,960,000	6,973,581,000	1,283,268,000	0	0	0	0	0	0	9,139,809,000
		REALISASI	855,953,000 (96.94%)	6,693,074,768 (95.98%)	1,165,288,169 (90.81%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	8,714,315,937 (95.34%)
		SISA	27,007,000	280,506,232	117,979,831	0	0	0	0	0	0	425,493,063

Sumber : OM SPAN per tanggal 23 Januari 2025

Gambaran perbandingan realisasi anggaran KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 3. 2 Perbandingan realisasi terhadap pagu anggaran 2021-2024



Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN)

Realisasi anggaran KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2024 apabila diklasifikasikan berdasarkan programnya, dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode	Realisasi Anggaran KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2024			
	Uraian	Pagu Akhir 2024	Realisasi 2024	Persentase
KPP Pratama Jakarta Duren Sawit		9.137.728.000	8.714.315.937	95,37%
015.04.WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	7.274.729.000	6.975.250.138	95,88%
015.04.WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	882.960.000	855.963.000	96,94%
015.04.CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	347.157.000	321.159.886	92,51%
015.04.CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	292.528.000	275.293.738	94,11%
015.04.CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	340.354.000	286.659.175	84,22%

Berdasarkan rincian tersebut, terdapat perbedaan pagu anggaran yang telah disesuaikan pada Aplikasi Online Monitoring SPAN dengan prognosa anggaran pada perjanjian kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian pagu anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp8.959.043.000,00 tetapi pada pelaksanaannya pagu anggaran akhir KPP Pratama Jakarta Duren Sawit adalah sebesar Rp9.137.728.000,00. Perbedaan rincian pagu anggaran pada Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Perbedaan Pagu Anggaran Tahun 2024

Program/Kegiatan Tahun 2024	Pagu Anggaran pada Perjanjian Kinerja	Pagu Anggaran OM SPAN
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	399.543.000	347.157.000
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	250.340.000	292.528.000
Pengawasan dan Penegakan Hukum	365.444.000	340.354.000
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	7.063.538.000	7.274.729.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	880.178.000	882.960.000
Total	8.959.043.000	9.137.728.000

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor efisiensi, utamanya efisiensi penggunaan anggaran merupakan faktor yang penting untuk dilakukan instansi pemerintah, utamanya KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dimana salah satu komponen formula penghitungan efektifitas penggunaan anggaran adalah penggunaan anggaran yang efisien. Untuk itu, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen menjaga efisiensi penggunaan anggaran sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melakukan upaya efisiensi penggunaan uang lembur dengan menerbitkan Nota Dinas Kepala Kantor nomor ND-406/KPP.2009/2024 tentang Upaya Efisiensi Penggunaan Uang Lembur. Nota Dinas ini dibuat dengan tujuan untuk menegaskan besaran pagu uang lembur KPP Pratama Jakarta Duren Sawit untuk tahun 2024 beserta dengan realisasi pada tahun 2023. Dengan adanya ketentuan efisiensi ini, diharapkan pegawai dapat mengoptimalkan waktu kerja dan sumber daya yang disediakan oleh kantor sehingga hanya menggunakan uang lembur sesuai dengan tujuan kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membuat usulan revisi anggaran sebagai upaya efisiensi biaya perjalanan dinas. Hal ini sebagai tindak lanjut atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024. Dengan adanya permintaan revisi ini, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit kemudian melakukan efisiensi atas pagu perjalanan dinas, sehingga diharapkan seluruh pegawai juga dapat melaksanakan pengakuan biaya dinas dengan bijak sesuai dengan ketentuan baru tersebut.

Selain efisiensi anggaran, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit juga melakukan efisiensi dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia (pegawai) demi mengoptimalkan kinerja masing – masing pegawai yang akan berdampak juga pada kinerja kantor yang lebih prima. Beberapa langkah yang diambil oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sebagai upaya efisiensi sumber daya manusia diantaranya adalah :

1. Melakukan pendataan atas pegawai yang mengajukan cuti pada hari libur panjang/ *long weekend*, sehingga jumlah pegawai yang melakukan cuti tidak akan terlalu banyak hingga mengganggu pelaksanaan pekerjaan dinas;
2. Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit bersama dengan bagian Kepatuhan Internal secara rutin melakukan sidak pegawai sebagai bentuk mengakrabkan diri dengan lingkungan kerja sehari – hari para pegawai serta bentuk kontrol kedisiplinan pegawai. Dengan agenda ini, diharapkan pegawai tetap menjaga kedisiplinan dan integritasnya sebagai pegawai Kementerian Keuangan;

3. Mengontrol hasil lembur pegawai sehingga pegawai dapat mempertanggungjawabkan dana lembur yang diterima dengan hasil kerja yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan dengan atasan.

D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Atas hasil realisasi kinerja tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melaksanakan Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi bulan Januari 2025 yang membahas hasil kinerja dan proses kerja selama tahun 2024. Selain rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi, Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit juga secara rutin melakukan rapat pembinaan yang diadakan setiap bulan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja. Rapat Pembinaan ini memiliki dua versi yang dilakukan secara bergantian setiap bulan, yaitu rapat pembinaan yang diikuti oleh seluruh pejabat pengawas serta perwakilan pelaksana pada masing – masing seksi serta rapat pembinaan yang dilaksanakan *one on one* antara Kepala Kantor dengan satu seksi.

Pada sesi *one on one* ini, Kepala Kantor akan meminta masing – masing pegawai secara personal menjelaskan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan, hambatan kerja, serta saran – saran dan rencana kerja untuk bulan selanjutnya. Dengan metode ini, Kepala Kantor akan lebih mudah mengetahui secara terinci komitmen kerja dari masing – masing pegawai dan mengetahui kondisi yang sebenarnya pada lingkungan kerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

BAB IV

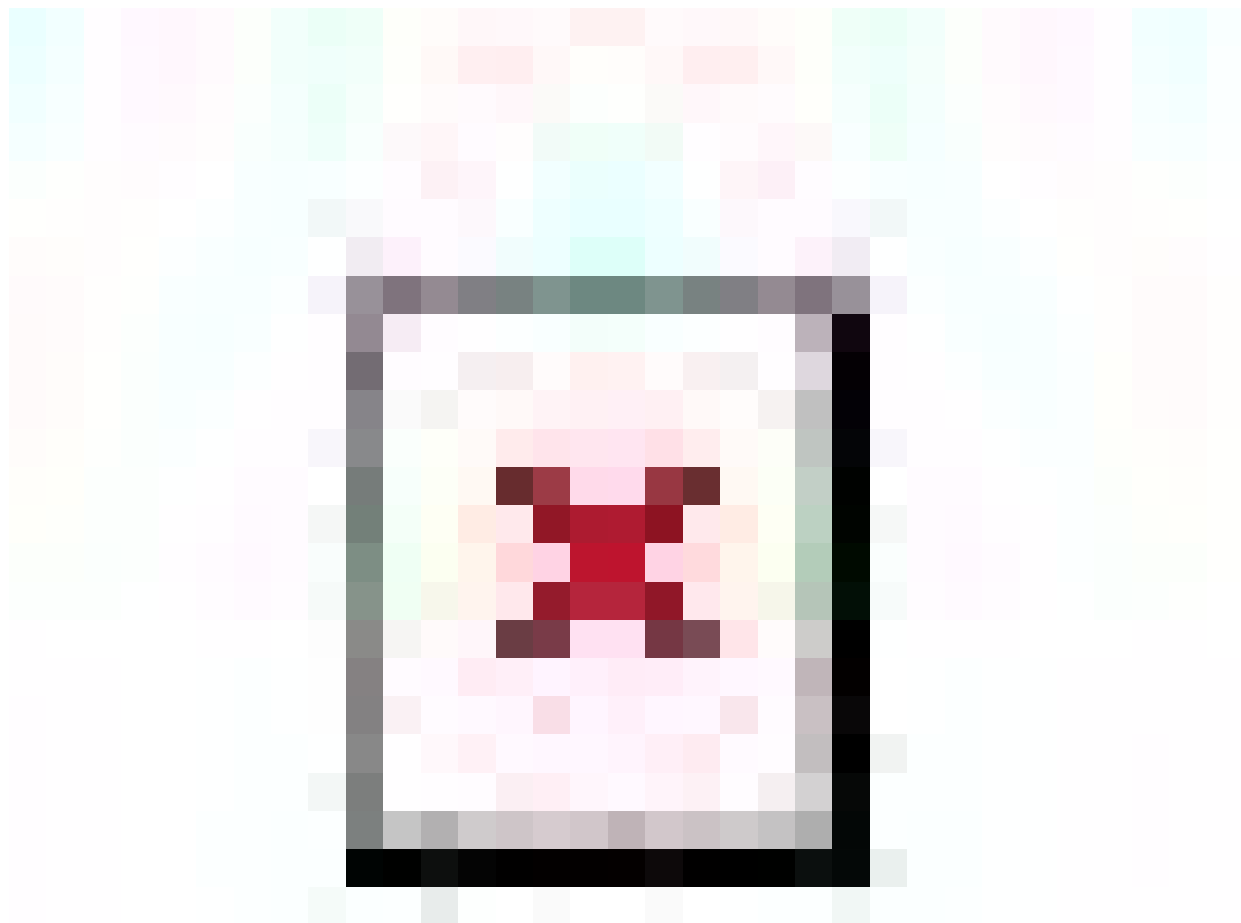
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan hasil evaluasi kinerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja yang secara kuantitatif dan kualitatif menggambarkan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja unit kerja periode yang akan datang.

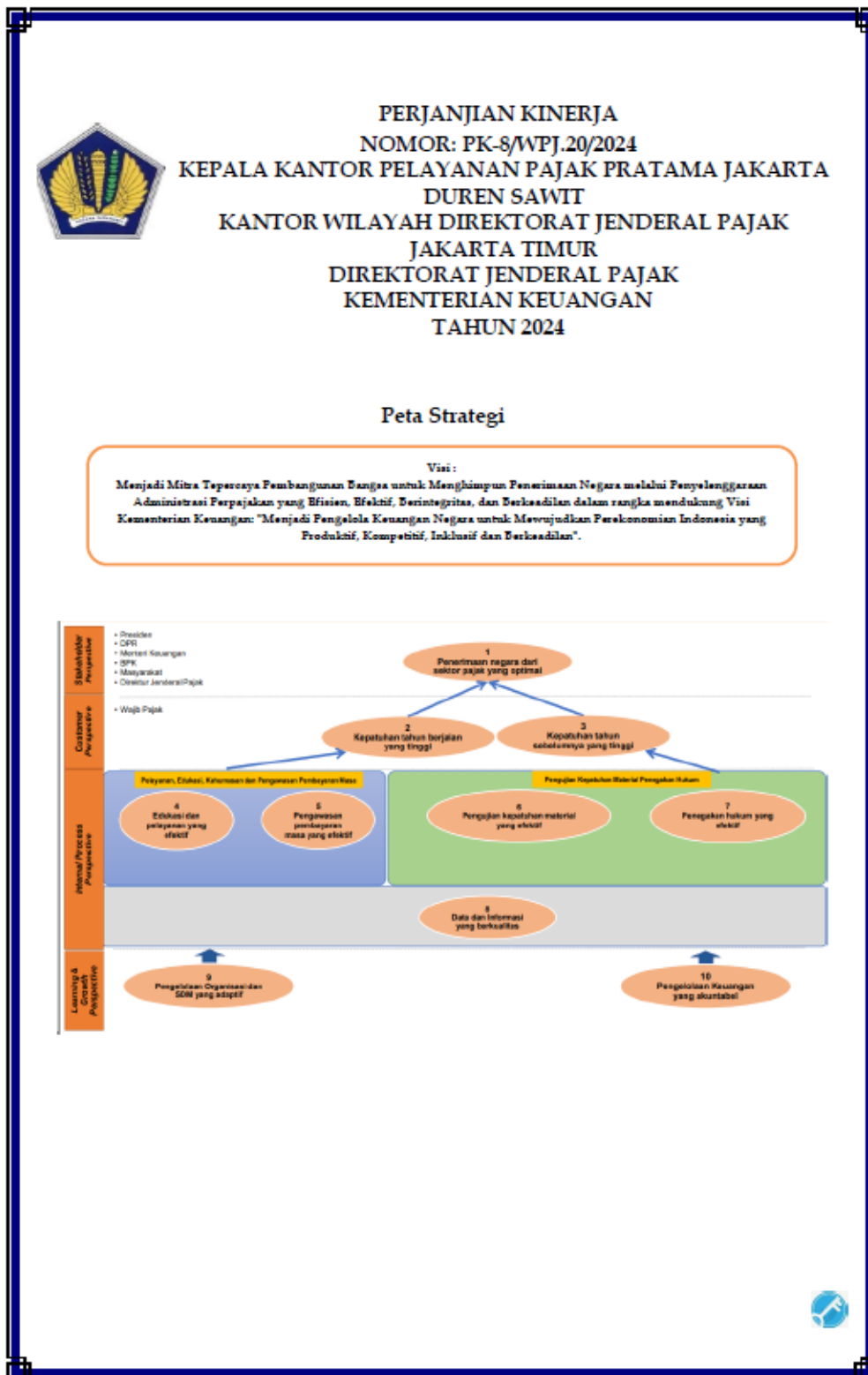
Target IKU DJP Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 19 IKU seluruhnya telah berstatus hijau dengan total capaian sebesar 109,14%.

Dengan tercapainya seluruh IKU di tahun 2024 ini, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berkomitmen untuk tetap mempertahankan kinerja dengan meningkatkan sinergi dan kerja sama seluruh pegawai, meningkatkan kualitas kerja dan keaktifan Komite Kepatuhan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat kembali mencapai target penerimaan di tahun 2025.

Nilai Kinerja Organisasi
Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur
KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
Periode Pelaporan s.d. Triwulan IV Tahun 2024



Perjanjian Kinerja
Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA DUREN SAWIT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Perilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.015.327.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 399.543.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 250.340.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 365.444.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 7.943.716.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 7.063.538.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 880.178.000
Total	Rp 8.959.043.000

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dasto Ledyanto

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Duren Sawit,



Ditandatangani Secara Elektronik
Amty Nurhayati

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA DUREN SAWIT
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Duren Sawit,



Ditandatangani Secara Elektronik
Amty Nurhayati



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Amty Nurhayati		NAMA	Dasto Ledyanto
NIP	196908231995032002		NIP	196612021992011001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit		JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis

		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran

10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
	- Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Amty Nurhayati
196908231995032002



Ditandatangani secara elektronik

Dasto Ledyanto
196612021992011001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	99 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100

17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Amty Nurhayati
196908231995032002

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Dasto Ledyanto
196612021992011001